

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Annisa Ramadhany  
No Mahasiswa : 18313090  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
2021

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ilmu Ekonomi  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Annisa Ramadhany  
No Mahasiswa : 18313090  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**  
2021

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UIL. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Maret 2022

Penulis



Annisa Ramadhany

## PENGESAHAN

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Nama : Annisa Ramadhany  
Nomor Mahasiswa : 18313090  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 4 Maret 2022  
telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Prof. Jaka Sriyana, SE., MSi., Ph.D

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI INDONESIA**

Disusun Oleh : **ANNISA RAMADHANY**

Nomor Mahasiswa : **18313090**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 04 April 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji : Heri Sudarsono, S.E., M.Ec

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tercinta dan terkasih.

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Hendra dan Ibu Neneng atas doa dukungannya yang telah diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya bisa menyelesaikan kewajiban saya belajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
2. Diri saya sendiri yang tidak menyerah, dan selalu berproses sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kedua orangtuaku tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, baik dari segi moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan sarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi, Staff, dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Sahabat penulis, Nisa yang selalu ada dan bersedia memberikan dukungan dalam berbagai hal terutama saat proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman IE angkatan 2018 khususnya Ayun dan Tika. Terima kasih sudah berjuang dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh***

Yogyakarta, 4 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annisa Ramadhany', written in a cursive style.

Annisa Ramadhany



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	iv
PENGESAHAN UJIAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK.....	xii
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.2. Landasan Teori.....	16
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran .....	30
2.4. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Data dan Definisi Operasional.....	31
3.2. Metode Analisis Data .....	33
3.3. Pengujian Hipotesis.....	37
BAB IV.....	38
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	38
4.1. Analisis Deskripsi Data Penelitian .....	38
4.2. Hasil Uji Regresi Panel .....	39
BAB V.....	50
SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....	50
5.1. Simpulan .....	50
5.2. Implikasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	52
DAFTAR LAMPIRAN.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Seluruh Provinsi Indonesia (Rupiah) .....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Masing-Masing Variable .....	38
Tabel 4.2. Hasil <i>Common Effects</i> .....	39
Tabel 4.3. Hasil <i>Fixed Effect</i> .....	40
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	40
Tabel 4.5. Hasil <i>Fixed Effects</i> .....	40
Tabel 4.6 Hasil <i>Random Effects</i> .....	41
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman.....	41

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Tahun ke Tahun (Persen).....	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 3.1. Uji Pemilihan Model .....	35

## ABSTRAK

Kejatuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 dipercaya bukan hanya disebabkan oleh krisis Thailand namun juga disebabkan oleh lemahnya kondisi fundamental ekonomi pada saat itu dengan sistem sentralistiknya. Oleh karena itu, pada tahun 2001 Indonesia mengubah sistem ekonomi serta pemerintahannya menjadi bersifat desentralisasi. Namun, terjadi banyak perdebatan tentang desentralisasi. Sebagian ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sebagian lain meyakini bahwa desentralisasi mungkin dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya cenderung menyulitkan manajemen makroekonomi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidakmerataan dan ketimpangan, serta memperburuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain desentralisasi fiskal terdapat terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia yaitu tenaga kerja dan inflasi. Meningkatnya tenaga kerja berarti akan meningkatkan output per kapita atau biasa disebut dengan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas inilah yang menjadi kontribusi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan inflasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kondisi perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Desentralisasi fiskal menggunakan ukuran dari sisi penerimaan APBD yaitu dana perimbangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan, dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan dana bagi hasil, tenaga kerja dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

***Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Tenaga Kerja, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi.***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat serta kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). Peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu negara menandakan bahwa perekonomian di wilayah tersebut dalam kondisi baik. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka menandakan bahwa kondisi perekonomian di wilayah tersebut tidak dalam kondisi yang baik.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada tahun 1990-1996 mengalami peningkatan, di mana pada saat itu Indonesia menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi. Akan tetapi situasi dan keadaan menjadi buruk ketika awal tahun 1997 di mana pada saat itu nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga minus 13.13% di tahun 1998. Kejatuhan ekonomi Indonesia pada saat itu dipercaya bukan hanya karena faktor krisis Thailand namun juga disebabkan oleh fundamental ekonomi pada saat itu yang lemah dengan sistem sentralistiknya. Oleh karena itu, pada tahun 2001 Indonesia mengubah sistem ekonomi serta pemerintahannya menjadi bersifat desentralisasi (Nawatmi et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 8, menjelaskan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saputra & Mahmudi (2020) mengatakan

bahwa perdebatan tentang desentralisasi mencakup banyak isu. Dalam kaitannya dengan manajemen makroekonomi isu-isu kunci yang menonjol adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik. Sebagian ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sebagian lain meyakini bahwa desentralisasi mungkin dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya cenderung menyulitkan manajemen makroekonomi, memperlambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakmerataan dan ketimpangan, serta memperburuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi Fiskal sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah dapat menjadi ukuran kemandirian keuangan di daerah (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021). Desentralisasi fiskal adalah pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan fiskal. Melalui desentralisasi fiskal dapat dilihat pembangunan ekonomi lokal sudah berjalan baik atau belum berjalan baik.

Desentralisasi fiskal dapat dilakukan dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Desentralisasi fiskal sisi penerimaan lebih ke arah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sendiri, biasanya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal sisi penerimaan ini tidak mudah dilaksanakan karena bervariasinya sumber-sumber penerimaan asli daerah. Umumnya, pemerintahan yang berada di perkotaan memiliki potensi ekonomi yang lebih besar sebagai sumber pendapatan daerahnya, terutama bila dilihat dari jenis-jenis pajak daerah yang umumnya memiliki basis pajak perkotaan, sedangkan untuk pemerintah daerah nonperkotaan perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan basis pajaknya yang didasarkan atas masing-masing potensi sumber dayanya (Mahi & Supriyanti, 2019).

Zainuddin et al., (2021) mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu respon pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah (subnasional) untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dalam melakukan penetapan pembelanjaan pembangunannya. Seperti untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal, dan alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Ini pun menjadi hal yang masuk akal dimana pemerintah Indonesia sendiri harus lebih memperhatikan secara luas dan terperinci beberapa daerah yang ada pada negara tersebut.

Bagi pemerintah pusat yang tidak turun langsung secara pribadi ke wilayah daerah, menjadi sulit buat mempertemukan serta mengakomodasi kepentingan daerah, sehingga desentralisasi fiskal diharapkan bisa memberikan akomodasi yang sejalan menggunakan preferensi individu masyarakat daerah sebab Pemerintah Daerah lebih memahami serta menjadi lebih sadar akan kepentingannya dan kepentingan rakyat daerahnya guna menjadikan kesejahteraan rakyat yang berada pada daerah tersebut.

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Tahun ke Tahun (Persen)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010(diolah)*

Berdasarkan pada data gambar di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi dari triwulan 4 di tahun 2020 masih terkontraksi sebesar -2,19%. Akan tetapi hal ini mendapat perbaikan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 di tahun 2020 yang terkontraksi hingga mencapai -3,49. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia masih belum bisa mencapai tujuan yang diinginkan yaitu meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemberian dana oleh kementerian keuangan menjadi sasaran penting yang harus dilihat perkembangannya. Kemudian adapun yang penulis dapati melalui badan pusat statistik mengenai realisasi dana perimbangan yang dialokasika



pemerintah pusat kepada pemprov, pemkab, dan pemkot mulai dari tahun 2017 hingga 2019.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Seluruh Provinsi Indonesia (Rupiah)**

	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>	<b>DBH</b>	<b>Total Dana Perimbangan</b>
<b>2019</b>	55.763.530.032	59.998.473.695	33.535.350.766	149.297.354.493
<b>2018</b>	56.606.500.497	60.548.838.048	35.130.152.573	152.285.491.118
<b>2017</b>	58.497.175.160	71.627.423.6233	39.897.979.975	170.022.578.758

*Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016 – 2019 (diolah)*

Dari data tabel di atas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan secara berkelanjutan terhadap jumlah yang dialokasikan ke daerah baik bagi semua jenis dana perimbangan yang mana Dana Alokasi Umum memiliki peran yang besar karena nilai yang diberikan sangat tinggi. Kemudian Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang terkecil di antara kedua dana tersebut. Besarnya kedua peran DAU dan DBH menjadi bukti di mana masa desentralisasi ini pemerintah daerah mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat dalam rangka penggunaan dana menunjukkan bahwa penggunaan kedua jenis dana tersebut sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah pusat.

Selain desentralisasi fiskal terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori telah menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sukirno (2000) menyatakan bahwa dalam teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik terdapat tiga jenis input yang dapat mempengaruhi salah satunya adalah tenaga kerja. Meningkatnya tenaga kerja berarti akan meningkatkan output per kapita atau biasa disebut dengan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas inilah yang menjadi kontribusi utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain desentralisasi fiskal dan tenaga kerja, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia yaitu inflasi. Menurut Ningsih dan Andiny (2020) inflasi dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kondisi perekonomian. Ketika yang terjadi inflasi ringan maka akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, namun sebaliknya jika terjadi inflasi yang tinggi (*hyperinflation*) maka keadaan perekonomian akan lesu. Masyarakat tidak bersemangat untuk menabung, berinvestasi dan memproduksi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas tentunya sangat penting untuk diteliti pengaruhnya guna mendapatkan solusi tepat dalam setiap permasalahannya karena pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan barang atau jasa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik agar dapat memberikan dampak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu dianalisis lebih dalam. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002– 2019?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019?
4. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019?

5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019
3. Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019
4. Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019
5. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002 – 2019

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca tentang pengaruh dana alokasi umum, dana bagi hasil, tenaga kerja, dan Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2002 – 2019.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam permasalahan yang terkait.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan yang menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Dalam bab ini juga disertai kerangka penelitian dan hipotesis.

##### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu metode data panel. Dalam bab ini juga membahas mengenai ruang lingkup penelitian yang terdiri dari jenis data, sumber data, dan metode dan persamaan penelitian yang digunakan dalam penelitian.

##### **BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengurai hasil uji data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan juga membahas hasil yang diperoleh.

##### **BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi yang diambil dari hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Landasan Teori

Sabilla dan Jaya (2014) telah melakukan penelitian dengan judul Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan berupa pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yaitu desentralisasi fiskal, inflasi dan tenaga kerja dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sasana (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan berupa pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yaitu desentralisasi fiskal, inflasi dan tenaga kerja dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apriesa & Miyasto (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Variabel dependen yang digunakan berupa pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan dan variabel independen yaitu desentralisasi fiskal, pajak daerah, jumlah penduduk dan tenaga kerja dengan metode analisis *panel ordinary least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan tenaga kerja memberikan dampak

yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan pajak daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Mursyawa & Sukarsa (2014) telah melakukan penelitian dengan judul dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Variabel dependen yang digunakan berupa pertumbuhan ekonomi dan variabel independen desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kurniawan (2018) yang telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Barat. Variabel dependen yang digunakan pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

Khamdana (2016) yang telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yaitu desentralisasi fiskal dengan indikator pendapatan, belanja dan otonomi), pertumbuhan, populasi, inflasi, dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Widianto, A., dkk (2016) yang telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, serta variabel

independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variable berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi khusus, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
1.	Kanetasya Sabila dan Wihana Kirana Jaya (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi per kapita Regional di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Bagi Hasil</li> <li>• Tenaga Kerja</li> <li>• Ekspor</li> </ul>	Regresi Panel	Variabel PAD, DAU, DBH, dan Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional di seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel ekspor tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional.
2.	Hadi Sasana (2015)	Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Desentralisasi Fiskal</li> </ul>	Regresi Berganda	Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,



		Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflasi</li> <li>• Tenaga Kerja</li> </ul>		sedangkan variabel tenaga kerja dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Lintantia Fajar Apriesta dan Miyasto (2013)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Desentralisasi Fiskal</li> <li>• Pajak Daerah</li> <li>• Jumlah Penduduk</li> <li>• Tenaga Kerja</li> </ul>	<i>Panel Ordinary Least Square</i>	Variabel desentralisasi fiskal dan tenaga kerja memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan pajak daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Sang Made Muryawan dan Made Sukarsa (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, <i>Fiscal Stress</i> , dan Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Desentralisasi Fiskal</li> </ul>	Regresi Berganda	Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

		Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fiscal Stress</i></li> <li>• Kinerja Keuangan</li> </ul>		
5.	Dian Kurniawan (2018)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> <li>• Dana Bagi Hasil</li> </ul>	Regresi Berganda	Variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	Khamdana, Abdillah (2016)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Desentralisasi Fiskal</li> </ul>	Regresi Data Panel	Desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan berhasil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

		Ekonomi Daerah di Indonesia	<p>(indicator pendapatan, belanja dan otonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Populasi</li> <li>• Inflasi</li> <li>• Investasi</li> </ul>		
7.	Widiyanto, A., dkk (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Dana Alokasi Umum</li> <li>• Dana Alokasi Khusus</li> <li>• Belanja Modal</li> </ul>	<i>Partial Least Square</i>	DAU, DAK, dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Arsyad (2016) menyatakan pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Oleh karena itu terdapat perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya dilihat dari kenaikan pendapatan nasional tanpa diikuti dengan perubahan sistem kelembagaan, sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional yang diikuti dengan perubahan sistem kelembagaan dan adanya pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari kenaikan output yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB adalah salah satu indikator yang dijadikan ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Berikut rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2004):

$$Y = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$Y$  : Laju Pertumbuhan Ekonomi

$PDB_t$  : Produk Domestik Bruto ADHK tahun sekarang

$PDB_{t-1}$  : Produk Domestik Bruto ADHK tahun sebelumnya

Produk Domestik Bruto mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut secara rinci. Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam perekonomian yang terlihat dari Produk Domestik Bruto dalam jangka panjang.

#### **2.1.1.1. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)**

Secara konseptual, perhitungan PDRB dapat menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan (Sukirno, 2004).

##### 1. Pendekatan Produksi (*Production approach*)

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi merupakan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

##### 2. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure approach*)

Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen tersebut dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu:

- 1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.
- 2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD.
- 3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang- barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.
- 4) Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.
- 5) Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (FOB).
- 6) Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight* (CIF).

3. Pendekatan Pendapatan (*Earnings approach*)

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

### 2.1.1.1. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2002) yaitu:

1. Faktor sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor sumber daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

5. Faktor sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

#### **2.1.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Teori Pertumbuhan David Ricardo**

Pemikiran pertumbuhan ekonomi David Ricardo yang terkenal yaitu tentang *the law of diminishing return*. Pemikiran ini menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi penurunan produk marginal dikarenakan terbatasnya pada jumlah tanah (sumber daya alam). Menurut Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan tercapai. (Arsyad, 1997).

##### **2. Teori Pertumbuhan Neoklasik**

Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan faktor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sumbangan relatif dari berbagai faktor ini dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo-Klasik ditunjukkan bagaimana tiga jenis input, yaitu; modal, teknologi dan tenaga kerja menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan peranan dari modal dan perkembangan teknologi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

##### **3. Teori pertumbuhan Adam Smith**

Adam Smith menjelaskan bahwa proses pertumbuhan ekonomi bersifat kumulatif. Apabila timbul kemakmuran sebagai suatu akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya



penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus menerus (Jhingan, 2000).

Semua ini terjadi dalam apa yang disebut Smith situasi progresif, yang di dalam kenyataan merupakan keadaan yang maju ini “Sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik, keadaan buruh miskin yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat agaknya menjadi kelompok yang paling bahagia dan paling nyaman”. Tetapi proses ini ada akhirnya. Kelangkaan sumber daya pada akhirnya memberhentikan pertumbuhan.

### **2.1.2. Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dan penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan di mana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri. (Haris, 2007)

Pemindahan wewenang dan tanggung jawab yang besar harus disertai pelimpahan sumber dana yang memadai (*money flows function*). Pemerintah pusat melakukan transfer ke pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Non pajak (DBH).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal resmi di berlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan pada Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga saat ini, kedua peraturan tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi. Terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan desentralisasi fiskal untuk mengatasi kesenjangan baik vertikal maupun horizontal karena adanya perbedaan potensi antar daerah satu dengan daerah lainnya. Penerapan desentralisasi fiskal ini diharapkan pemerintah daerah mampu berperan dalam mengelola keuangannya secara mandiri serta mengoptimalkan melalui mekanisme perencanaan yang efektif dan efisien.

#### 2.1.2.1. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004, pagu alokasi DAU ditetapkan minimal 26% dari total Penerimaan Dalam Negeri (PDN). Terakhir pada tahun 2017 dan tahun 2018 pagu alokasi DAU ditetapkan naik menjadi 28,7% dari PDN neto (Kemenkeu, 2020).

Mardiasmo, (2006) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*)
- b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
- c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; dan
- d) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah.

Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Di mana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif

lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi.

DAU dialokasikan atas dasar alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Wandira, 2013).

#### **2.1.2.2. Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu. Tujuan DAK adalah untuk membantu daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Khusus memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi DAK. DAK dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena

adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid*. (Mardiasmo, 2006).

Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Dalam menentukan daerah penerima DAK harus memenuhi tiga kriteria yaitu:

- 1) Kriteria Umum yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 2) Kriteria Khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- 3) Kriteria Teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

Dalam perkembangannya, penambahan bidang-bidang yang didanai dari DAK telah mengalami penambahan. Pada tahun 2005 pengalokasian DAK digunakan untuk mendanai kegiatan di 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian. Perkembangan terakhir terjadi pada tahun 2012, bidang-bidang yang didanai dari DAK menjadi 19 bidang yaitu:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1) Pendidikan              | 11) Keluarga berencana                      |
| 2) Kesehatan               | 12) Kehutanan                               |
| 3) Infrastruktur Jalan     | 13) Perdagangan                             |
| 4) Infrastruktur irigasi   | 14) Sarana dan prasarana daerah tertinggal  |
| 5) Infrastruktur air minum | 15) Listrik pedesaan                        |
| 6) Infrastruktur sanitasi  | 16) Perumahan dan permukiman                |
| 7) Prasarana pemerintah    | 17) Transportasi pedesaan.                  |
| 8) Kelautan dan perikanan  | 18) Sarana dan prasarana kawasan perbatasan |

- 9) Pertanian
- 10) Lingkungan hidup
- 19) Keselamatan transportasi darat

Sesuai peraturan perundang-undangan yang baru untuk daerah otonom, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana pendamping paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana pendamping ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Apabila daerah tidak bisa menggunakan DAK sebagaimana ketentuan teknisnya, sisa DAK di akhir tahun anggaran dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

#### **2.1.2.3. Dana Bagi Hasil**

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan bukan pajak (sumber daya alam).

Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara triwulanan yang dilaksanakan dengan cara pemindah buku dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam

negeri ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB.

Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 11, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a. kehutanan; b. pertambangan umum; c. perikanan; d. pertambangan minyak bumi; e. pertambangan gas bumi; dan f. pertambangan panas bumi.

Penggunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

### **2.1.3. Tenaga Kerja**

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut BPS, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.

Todaro (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja berarti akan meningkatkan jumlah produksi, sedangkan jumlah penduduk

yang besar akan memperluas pasar domestik. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

#### 2.1.4. Inflasi

Sukirno (2013) menjelaskan bahwa Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sehingga kenaikan harga yang hanya terjadi satu kali saja dengan persentase yang cukup besar tidak dapat dikatakan inflasi.

Inflasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan penyebabnya (Sukirno, 2013) yaitu:

1. Inflasi tarikan permintaan

Merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan *aggregate* pada saat keadaan perekonomian dalam keadaan *full employment*.

2. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi sehingga menyebabkan harga – harga barang juga mengalami peningkatan.

3. Inflasi diimpor

4. Kenaikan harga barang impor dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Sebagai contoh kasus kenaikan harga minyak yang menyebabkan negara pengimpor minyak juga mengalami peningkatan dalam biaya produksi, sehingga harga – harga barang juga mengalami kenaikan.

Jika dilihat berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi digolongkan menjadi 4 (empat) (Halim, 2012) yaitu:

1. Inflasi ringan (di bawah 10%)
2. Inflasi sedang (di antara 10% - 30%)
3. Inflasi berat (di antara 30% - 100%)
4. Hiperinflasi (di atas 100%)

## **2.2. Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan Adam Smith adalah modal. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber modal atau penerimaan yang bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dana alokasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pendapatan setiap provinsi dan untuk program-program tertentu sebagai bagian dari desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi. Artinya DAU memiliki pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabila & Jaya (2014), yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima daerah maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pertumbuhan Ekonomi**

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional (Ni Luh Dina, dkk., 2014).

Artinya DAK memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar dana alokasi yang diterima daerah maka akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian



yang dilakukan oleh Sabila & Jaya (2014), yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.3. Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain DAU dan DAK.

Apabila jumlah DBH semakin ditingkatkan, maka pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabila & Jaya (2014), bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.4. Hubungan Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi**

David Ricardo menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring bertambahnya jumlah penduduk ini nantinya akan menambah jumlah tenaga kerja (Arsyad, 1997). Meningkatnya tenaga kerja berarti akan meningkatkan output per kapita atau biasa disebut dengan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas inilah yang menjadi kontribusi utama bagi pertumbuhan ekonomi.

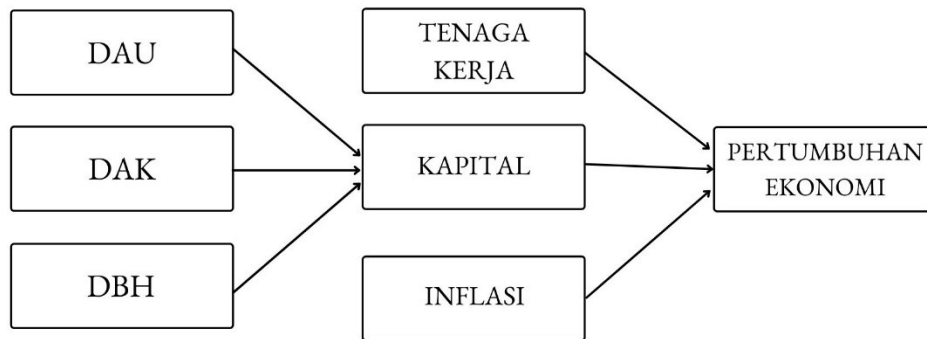
Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2015), yang menunjukkan hasil bahwa tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.5. Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Tidak semua Inflasi memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Terutama apabila yang terjadi adalah inflasi ringan. Justru inflasi ringan inilah yang nantinya dapat mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian. Karena inflasi dapat memberi dorongan bagi produsen untuk meningkatkan jumlah produksinya. (Simanungkalit, 2020)

Hal ini dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga maka produsen akan mendapat lebih banyak keuntungan. Dapat dikatakan jika inflasi meningkat maka jumlah PDRB juga meningkat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2015), yang menunjukkan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Diduga dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4. Diduga inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Data dan Definisi Operasional

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan runtut waktu dari tahun 2002 - 2019.

Terdapat 2 (dua) variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Variabel Dependen

Variabel Dependen atau terkait merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah data pertumbuhan ekonomi dengan satuan persen pada 32 provinsi di Indonesia berdasarkan harga konstan 2010 dari tahun 2002 - 2019.

#### 2. Variabel Independent

Variabel independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen yaitu:

1. Dana Alokasi Umum
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Bagi Hasil
4. Tenaga Kerja
5. Inflasi

### Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan

Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Persen
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.	Ribu Rupiah
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu. Bertujuan untuk membantu daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Ribu Rupiah
Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.	Ribu Rupiah
Tenaga Kerja	Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.	Jiwa
Inflasi	Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus.	Persen

### 3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Data panel terdiri dari gabungan data antara *cross section* (data silang) dan data *time series* (runtun waktu). Data *Cross section* (data silang) yaitu data yang terdiri dari 32 provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* (runtun waktu) merupakan periode waktu data yang digunakan yaitu dari tahun 2002- 2019.

Pemilihan metode regresi data panel ini pada penelitian ini karena regresi data panel akan memberikan hasil analisis yang lebih baik secara statistik. Penggabungan data *cross section* dan *time series* akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar dan dapat mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted variable*). (Sriyana,2014).

Untuk dapat melihat pengaruh desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi, peneliti menggunakan regresi data panel yang di aplikasi kan pada *Eviews 9*.

Persamaan regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 TK_{it} + \beta_5 Inflasi_{it} + e_{it} \quad (1)$$

$$i = 1, 2, \dots n$$

$$t = 1, 2, \dots n$$

Dimana:

*PE* : Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

*DAU* : Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)

*DBH* : Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)

*TK* : Tenaga Kerja (Jiwa)

<i>Inflasi</i>	: Inflasi (Persen)
$\beta_0$	: Intersep (Konstanta)
$\beta_1$	: Koefisien regresi
$e$	: Variabel gangguan ( <i>error</i> )
$n$	: banyaknya observasi
$t$	: banyaknya waktu
$n \times t$	: banyaknya data panel

Terdapat 3 (tiga) metode pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu:

1. Metode *Common Effects*

Metode *common effects* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hanya dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section* menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). (Widarjono, 2018).

Model persamaan regresi dalam bentuk linier sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

2. Metode *Fixed Effects*

Menurut Sriyana (2014), metode *fixed effects* merupakan suatu regresi yang menunjukkan perbedaan intersep antar obyek. Untuk menjelaskan adanya perbedaan intersep dalam metode *fixed effects* dapat menggunakan *variable dummy*. Terdapat 2 (dua) asumsi dalam model regresi ini, yaitu:

- 1) Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit
- 2) Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu

Model persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{2it} + \beta_5 D_{3it} + e_{it}$$

### 3. Metode *Random Effects*

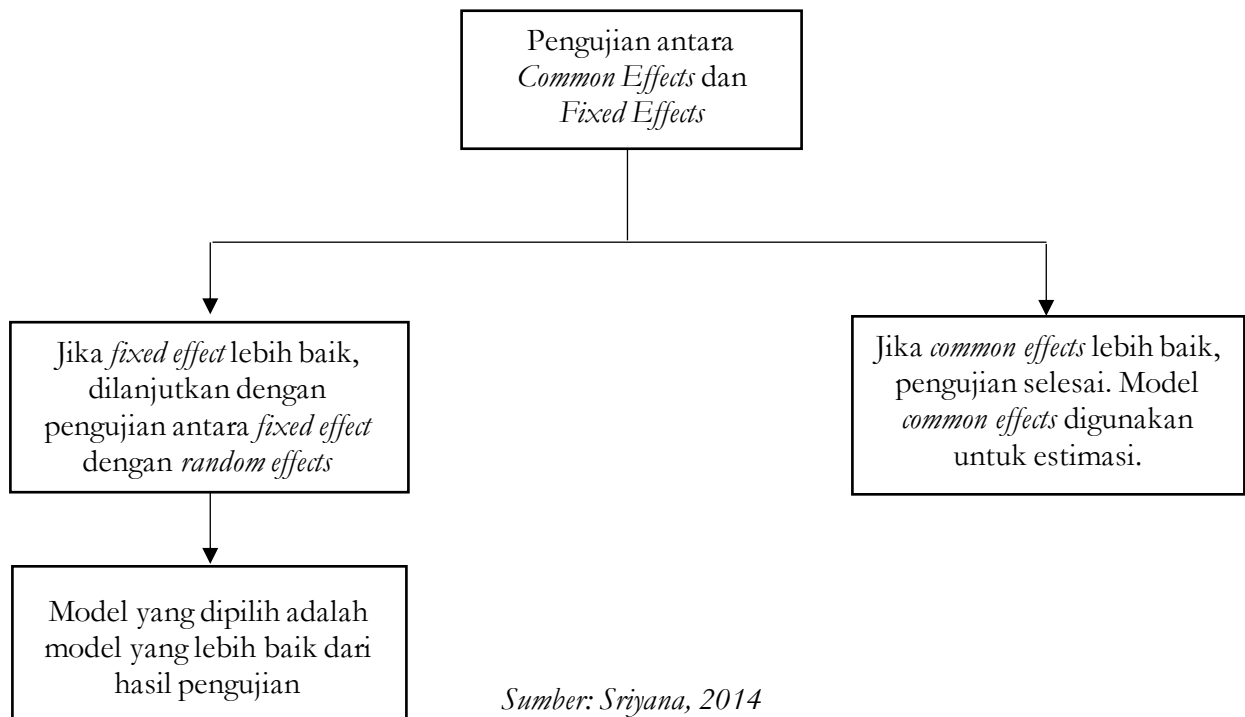
Dalam metode *random effects* diasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. (Sriyana, 2014).

Metode yang tepat digunakan dalam hal ini adalah *Generalized Least Square (GLS)*, dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + v_{it}; v_{it} = e_{it} + \mu_i$$

Ada 3 (tiga) uji pemilihan model yang dapat digunakan untuk menentukan metode mana yang sebaiknya dipilih untuk regresi data panel, yaitu Uji F untuk signifikansi *fixed effects*, uji LM untuk signifikansi *random effects*, dan uji Hausman untuk signifikansi *fixed effects* dan *random effects*, yang dapat dijelaskan secara singkat dalam bagan berikut:

Gambar 3.1. Uji Pemilihan Model



Sumber: Sriyana, 2014

### 3.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan metode mana yang akan digunakan untuk estimasi antara *common effect* dengan *fixed effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Menggunakan estimasi model *common effect*

$H_a$  = Menggunakan estimasi model *fixed effect*

Dikatakan signifikan apabila *p-value* kurang dari 5% atau 10% sehingga menggunakan estimasi model *fixed effect*, atau apabila *p-value* lebih dari 5% atau 10% maka menggunakan estimasi model *common effect*.

### 3.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan metode mana yang akan digunakan untuk estimasi antara *random effect* dengan *fixed effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Menggunakan estimasi model *random effect*

$H_a$  = Menggunakan estimasi model *fixed effect*

Dikatakan signifikan apabila *p-value* kurang dari 5% sehingga menggunakan estimasi model *fixed effect*, atau apabila *p-value* lebih dari 5% maka menggunakan estimasi model *random effect*.

### 3.2.3 Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Uji *langrange multiplier* merupakan uji yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *command effect* dengan *random effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Menggunakan estimasi model *common effect*

$H_a$  = Menggunakan estimasi model *random effect*

Dikatakan signifikan apabila *p-value* kurang dari 5% sehingga menggunakan estimasi model *random effect*, atau apabila *p-value* lebih dari 5% maka menggunakan estimasi model *random effect*.



### **3.3 Pengujian Hipotesis**

#### **3.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinan ( $R^2$ ) merupakan uji yang mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi dependen. Ketika nilai  $R^2$  mendekati satu artinya semakin kuat variabel independen dalam model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilainya mendekati nol maka variabel independen tidak menjelaskan seluruh variabel dependen atau tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### **3.3.2 Uji Coefficient**

Uji Coefficient adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas pada hasil regresi. Apabila nilainya positif maka menandakan hubungan searah dan jika negatif artinya hubungan tidak searah.

#### **3.3.3 Uji Signifikansi (Uji T)**

Uji t digunakan untuk melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Analisis Deskripsi Data Penelitian

Jenis data yang digunakan merupakan data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dengan data *cross section*. Data *cross section* diambil dari 32 Provinsi di Indonesia sedangkan data *time series* diambil dari tahun 2002 hingga 2019. Variabel independen yang digunakan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Tenaga Kerja dan Inflasi, sedangkan variabel dependen yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Ariefianto (2012) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Berikut hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan:

**Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Masing-Masing Variable**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	576	-22,53	36,40	5,36	3,69
Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)	576	164.514	5073558835	819400582,5	663917419,2
Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)	576	320.4500	24049198035	531485971,4	1261285387
Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)	576	343.045	10018939411	457016358,5	1172602687
Tenaga Kerja (Jiwa)	576	271.143	22103586	3255701,57	4817205,45
Inflasi (Persen)	576	0,23	29,34	6,40	4,16

*Sumber: Hasil olah data views 9*

Pada tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian sebanyak 576. Besar laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 36,40% di provinsi Papua pada tahun 2005. Nilai laju pertumbuhan ekonomi terendah sebesar -22,53% yang juga terjadi di provinsi Papua pada tahun 2004. Nilai dana alokasi umum tertinggi pada penelitian ini sebesar Rp. 5.073.558.835.000 di provinsi Sumatera Selatan pada

tahun 2009 dan DAU terendah sebesar Rp. 164.514.000 di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010. Dana bagi hasil tertinggi pada penelitian ini sebesar Rp. 24.049.198.035 di provinsi pada tahun dan DBH terendah sebesar Rp. 320.4500.000 di provinsi Gorontalo pada tahun 2002. Dana alokasi khusus tertinggi pada penelitian ini sebesar Rp. 10.018.939.411.000 di provinsi pada tahun dan DAK terendah sebesar Rp. 343.045.000 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2002. Jumlah tenaga kerja tertinggi pada penelitian ini sebesar 2.2103.586 jiwa di provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 dan jumlah tenaga kerja terendah sebesar 271.143 jiwa di provinsi Papua Barat pada tahun 2007. Inflasi tertinggi pada penelitian ini sebesar 29,34% di provinsi Aceh pada tahun 2005 dan inflasi terendah sebesar 0,23% di provinsi Aceh pada tahun 2012.

## 4.2. Hasil Uji Regresi Panel

### 4.2.1. Pemilihan Model

#### 4.2.1.1. Uji Chow

**Tabel 4.2. Hasil *Common Effects***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.080257	0.429516	11.82785	0.0000
DAU	5.33E-10	3.33E-10	1.601377	0.1098
DBH	-3.68E-08	1.23E-10	-2.982888	0.0030
DAK	-2.01E-10	1.83E-10	-1.095613	0.2737
TK	1.17E-08	3.67E-08	0.319702	0.7493
INFLASI	0.015570	0.040051	0.388742	0.6976
Adjust R-square	0.013133			
Prob(F-statistic)	0.028023			

*Sumber: Hasil olah data eviems 9*

**Tabel 4.3. Hasil *Fixed Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.216946	1.159123	2.775327	0.0057
DAU	6.52E-10	3.74E-10	1.741390	0.0822
DBH	7.10E-12	1.50E-10	0.047231	0.9623
DAK	-4.03E-10	1.96E-10	-2.050729	0.0408
TK	4.69E-07	3.71E-07	1.262117	0.2075
INFLASI	0.042239	0.039474	1.070037	0.2851
Adjust R-square	0.107324			
Prob(F-statistic)	0.0000			

Sumber: Hasil olah data views 9

**Tabel 4.4 Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.940125	(31,539)	0.0000
Cross-section Chi-Square	89.989977	31	0.0000

Sumber: Hasil olah data views 9

Dari hasil di atas nilai *Cross-section Chi Square* sebesar 89.989977 dan probabilitas sebesar 0.00. Berdasarkan hasil tersebut nilai probabilitas 0.00 kurang dari 0.05 sehingga menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis  $\alpha$ . Dapat disimpulkan bahwa *p-value* signifikan sehingga kita dapat menggunakan estimasi model *fixed effect*.

#### 4.2.1.2. Uji Hausman

**Tabel 4.5. Hasil *Fixed Effects***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.216946	1.159123	2.775327	0.0057
DAU	6.52E-10	3.74E-10	1.741390	0.0822

DBH	7.10E-12	1.50E-10	0.047231	0.9623
DAK	-4.03E-10	1.96E-10	-2.050729	0.0408
TK	4.69E-07	3.71E-07	1.262117	0.2075
INFLASI	0.042239	0.039474	1.070037	0.2851
Adjust R-square	0.107324			
Prob(F-statistic)	0.0000			

*Sumber: Hasil olah data evienvs 9*

**Tabel 4.6 Hasil Random Effects**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.805505	0.463828	10.36054	0.0000
DAU	7.02E-10	3.35E-10	2.096675	0.0365
DBH	-1.92E-10	1.32E-10	-1.456852	0.1457
DAK	-2.60E-10	1.77E-10	-1.463673	0.1438
TK	7.84E-09	4.96E-08	0.158060	0.8745
INFLASI	0.028491	0.038751	0.735211	0.4625
Adjust R-square	0.003179			
Prob(F-statistic)	0.235095			

*Sumber: Hasil olah data evienvs 9*

**Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman**

Trst Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	10.699299	5	0.0577

*Sumber: Hasil olah data evienvs 9*

Dari hasil di atas nilai *Cross-section random* sebesar 10.699299 dan probabilitas sebesar 0.0577. Berdasarkan hasil tersebut nilai probabilitas 0.0577 lebih besar dari 0.05

sehingga menolak hipotesis nol. Maka dapat disimpulkan bahwa *p-value* signifikan sehingga kita dapat menggunakan estimasi model *fixed effect*.

#### 4.3. Estimasi *Fixed Effects*

Berdasarkan hasil uji signifikansi tersebut maka disimpulkan bahwa metode estimasi yang tepat adalah *fixed effect* sehingga persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$PE = 3.216946 + 6.52E - 10DAU + 7.10E - 12DBH - 4.03E - 10DAK + 4.69E - 07TK + 0.042239INFLASI$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi (Milyar Rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)

DBH = Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)

TK = Tenaga Kerja (Jiwa)

Inflasi = Inflasi (Persen)

##### 4.3.1. Pengujian Hipotesis

###### 4.3.1.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinan ( $R^2$ ) merupakan uji yang mengukur ketepatan kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi dependen. Apabila nilai  $R^2$  mendekati satu artinya semakin kuat variabel independen penelitian yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Tenaga Kerja, dan Inflasi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil regresi *fixed effect model* nilai  $R^2$  sebesar 0.107324 artinya pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel DAU,

DBH, DAK, Tenaga Kerja, dan Inflasi sebesar 10.74% dan sisanya 89,26% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 4.3.1.2. Uji Koefisien

1. Dilihat dari nilai  $\beta_0$  sebesar 3.216946 menunjukkan hubungan searah dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Tenaga Kerja, dan Inflasi. Artinya apabila nilai DAU, DBH, Tenaga Kerja, dan Inflasi adalah 0 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3.216946 milyar rupiah terhadap DAU.
2. Dilihat dari nilai  $\beta_1$  sebesar 6.52E-10 menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila DAU meningkat sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan sebesar 6.52E-10 persen.
3. Dilihat dari nilai  $\beta_2$  sebesar 7.10E-12 menunjukkan bahwa DBH memiliki hubungan tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila DBH meningkat sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 7.10E-12 persen.
4. Dilihat dari nilai  $\beta_3$  sebesar -4.03E-10 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki hubungan tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila dana alokasi khusus meningkat sebesar satu rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 4.03E-10 persen.
5. Dilihat dari nilai  $\beta_4$  sebesar 4.69E-07 menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila tenaga kerja bertambah satu jiwa maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan sebesar 4.69E-07 persen.
6. Dilihat dari nilai  $\beta_5$  sebesar 0.042239 menunjukkan bahwa inflasi

memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila inflasi meningkat sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.042239 persen.

#### 4.3.1.3. Uji T

##### Estimasi Pengujian Hipotesis

1. Pengujian terhadap koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU)  
Berdasarkan hasil estimasi tersebut menunjukkan nilai t-statistik DAU sebesar 1.741390 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0822 lebih kecil dari  $\alpha = 10\%$  sehingga signifikan yang berarti variabel DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengujian terhadap koefisien variabel Dana Bagi Hasil (DBH)  
Berdasarkan hasil estimasi tersebut menunjukkan nilai t-statistik DBH sebesar 0.047231 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.9623 lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  sehingga tidak signifikan yang berarti variabel DBH tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pengujian terhadap koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Berdasarkan hasil estimasi tersebut menunjukkan nilai t-statistik DAK sebesar -2.050729 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0408 lebih kecil dari  $\alpha = 10\%$  sehingga signifikan yang berarti variabel DAK berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Pengujian terhadap koefisien variabel Tenaga Kerja  
Berdasarkan hasil estimasi tersebut menunjukkan nilai t-statistik tenaga kerja sebesar 1.262117 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.2075 lebih besar kecil dari  $\alpha = 10\%$  sehingga tidak signifikan yang berarti variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



#### 5. Pengujian terhadap koefisien variabel Inflasi

Berdasarkan hasil estimasi tersebut menunjukkan nilai t-statistik inflasi sebesar 1.070037 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.2851 lebih besar dari  $\alpha = 10\%$  sehingga tidak signifikan yang berarti variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **4.3.2. Analisis Ekonomi**

#### **4.3.2.1. Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka ketika terjadi DAU mengalami peningkatan atau penurunan nilai akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sabilla dan Jaya (2014) yang memperlihatkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional. Alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan pendapatan di setiap provinsi dan juga ditunjukkan untuk program - program khusus di bawah desentralisasi fiskal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian yang menunjukkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bisa disebabkan oleh persentase DAU yang kurang mencerminkan pembentukan PDRB atau karena pengelolaan DAU yang tidak dilakukan secara maksimal. DAU dibelanjakan di luar daerah, sehingga peningkatan jumlah DAU justru akan memperlambat pertumbuhan

ekonomi

#### 4.3.2.2. Analisis Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan

##### Ekonomi

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka ketika DBH mengalami peningkatan atau penurunan nilai tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari daerah melalui pembayaran pajak dan kepemilikan sumber daya alam yang dimasukkan ke dalam dana perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. DBH adalah modal yang cukup potensial untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) yang menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan alokasi DBH belum dialokasikan secara optimal untuk belanja pemerintah, seperti pembangunan fasilitas sarana umum (bidang infrastruktur, irigasi, pelatihan-pelatihan teknis, penelitian dan sebagainya) yang langsung di nikmati masyarakat dalam jangka waktu pendek. Selain itu besarnya realisasi DBH tidak merespons secara menyeluruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana proses *multiplier effect* secara nyata pada sumber daya manusia yang bergerak di berbagai sektor produk domestik regional bruto (PDRB).

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sabilla dan Jaya (2014) bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional. Selain itu Muryawan dan Sukarsa (2014), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu memengaruhi pertumbuhan

ekonomi secara langsung. Semakin tinggi DBH maka semakin tinggi pula harapan pembangunan daerah, sehingga DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **4.3.2.3. Analisis Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka ketika DAK mengalami peningkatan atau penurunan nilai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan pada aktivitas sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian yang pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peraturan yang mewajibkan penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD pastinya dapat menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang mungkin sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto, A., dkk (2016) dan Kurniawan (2018) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sabilla dan Jaya (2014) bahwa yang menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana dana alokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pendapatan setiap provinsi serta untuk

melaksanakan program-program tertentu sebagai bagian dari desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi.

#### **4.3.2.4. Analisis Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka ketika jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan atau penurunan tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Apriesta dan Miyasto (2013), Sabilla dan Jaya (2014) dan Sasana (2015) yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita. Artinya tenaga kerja berpengaruh penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Meningkatnya tenaga kerja berarti akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan atau biasa disebut dengan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan ikut meningkat.

#### **4.3.2.5. Analisis Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka ketika inflasi mengalami peningkatan atau penurunan nilai tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2015) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu studi empiris

di Amerika Latin oleh Vazquez dan McNab (2006) membuktikan bahwa desentralisasi akan menimbulkan ketidakstabilan makro ekonomi yang kemudian akan berakibat menurunkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nujum dan Rahman (2019) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Harga yang terus meningkat mengakibatkan kegiatan produktif menjadi tidak menguntungkan. Sehingga para pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk berspekulasi, seperti membeli tanah, rumah, dan bangunan. Hal ini mengakibatkan investasi yang bersifat produktif menjadi berkurang sehingga tingkat kegiatan ekonomi akan menurun dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi.

Beralihnya investasi masyarakat pada pembelian aset jangka panjang menyebabkan inflasi yang tinggi namun tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi bukan variabel penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan variabel pelengkap terhadap variabel lainnya yang belum diteliti dalam model penelitian ini.

## BAB V

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kebijakan dan keputusan pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi fiskal belum tepat. Dengan menggunakan ukuran dari sisi penerimaan APBD yaitu dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memberikan hasil yang berbeda. Dimana dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kedua*, tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat penulis berikan terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu:

1. Keputusan pemerintah pusat dalam menerapkan sistem desentralisasi fiskal belum tepat adanya, sehingga diperlukan perbaikan baik dalam peraturan maupun dalam realisasi penggunaannya sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Pemerintah perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia, berdasarkan hasil penelitian produktivitas tenaga kerja belum

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengadaan pelatihan dan pelatihan bagi masyarakat tentu dapat meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriesa, L. F., & Miyasto. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1-12.
- AriefiantoMoch, & Doddy. (2012). Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews. Jakarta: Erlangga.
- ArsyadLincolin. (1997). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.
- ArsyadLincolin. (2016). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016 - 2019. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Seri 2010 (Persen), 2017. Ekonomi Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Seri 2010 (Persen), 2018. Ekonomi Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Seri 2010 (Persen), 2019. Ekonomi Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Seri 2010 (Persen), 2020. Ekonomi Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- HalimM.A. (2012). Teori Ekonomika. Jelajah Nusa: Tangerang.
- HarisSyamsuddin. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPPI press.
- Jhingan. (2000). Tujuan Pokok Pembangunan Ekonomi. Jurnal Makro Ekonomi Jakarta.
- KhamdanaAbdillah. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Indonesia Treasury Review*, 1, 23-38.
- Kurniawan, Dian. (2018), "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006-2015", Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



- MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: sage publications Conyer.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transoaransi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Suatu Sarana Good Governace Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1.
- MursyawanS.M. , & SukarsaM. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Langsug di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 3, 440-451.
- NawatmiNusantara, A.S., & MaskurA. (2019). Desentralisasi dan Pertumbuhan Ekonomi . Article Journal, 978-979.
- SabilaKanetasya, & JayaKiranaWihana. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Kapita Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 12-22.
- SaputraB., & Mahmudi. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua.
- SasanaHadi. (2015). Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga di Provinsi di Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen, 30, 1-14.
- SriyanaJaka. (2014). Metode Regresi Data Panel. Yogyakarta: Ekonesia.
- SukirnoSadono. (2000). Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- SukirnoSadono. (2002). Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- SukirnoSadono. (2004). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- SukirnoSadono. (2013). Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- TodaraoP.M. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga Edisi ke Delepan. Jakarta: Erlangga.
- VazquezMartinez, & M. RobertMcNab. (2006). Fiscal Decentralization, Macrostability and Growth. Revista de Economia Publica, 24-49.
- WandiraGugusAbrie. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, 2, 44-51.
- WidarjonoAgus. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya: disertai Panduan Eviews, Edisi kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- WidiantodkkA., (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan. Monex Jurnal of Accounting Research Politeknik Harapan Bangsa, 5, 170-176.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1: Data yang digunakan

PROVINSI	TAHUN	INFLASI (PERSEN)	TENAGA KERJA (JIWA)	LAJU (PERSEN)	DAU (000 Rupiah)	DBH (000 Rupiah)	DAK (000 Rupiah)
ACEH	2002	10,57	1452258	20,07	150560000	551441270	16016714
ACEH	2003	4,02	1579635	5,52	76120000	692506300	170004454
ACEH	2004	7,17	1522504	-9,63	76124000	1129162145	156090000
ACEH	2005	29,34	1498971	-10,12	271147000	1891814486	229550000
ACEH	2006	10,51	1581415	1,56	460881000	1851890517	592800000
ACEH	2007	7,59	1588842	-2,36	487934000	1316988903	810699000
ACEH	2008	12,03	1619810	-5,24	557327156	2037382927	10620900
ACEH	2009	3,73	1712073	-5,51	509686224	1012728723	48189000
ACEH	2010	5,92	1771462	2,74	621074916	320171998	43415574
ACEH	2011	3,44	1838450	3,28	716646172	1494787433	50611300
ACEH	2012	0,23	1865186	-6,56	911080707	373305869	50413710
ACEH	2013	7,33	1899598	-2,26	1092445518	1507854184	75148510
ACEH	2014	8,19	1979279	1,93	1201612787	1188149094	72953790
ACEH	2015	1,43	2026390	15,39	1237894986	253017431	70866056
ACEH	2016	4,17	2070099	3,29	1263870989	178613269	129982373
ACEH	2017	4,16	2148306	4,18	2060263235	253413239	1489203024
ACEH	2018	1,65	2242028	4,61	2060263235	191892692	1483653795
ACEH	2019	2,77	2309721	4,15	2126193327	229603774	1744873155

SUMATERA UTARA	2002	10,17	4894694	4,56	260610000	124989198	28904203
SUMATERA UTARA	2003	3,75	4953537	4,81	301750000	178424757	4816867
SUMATERA UTARA	2004	7,40	4901865	5,74	319741000	193234463	184970000
SUMATERA UTARA	2005	20,86	5012571	5,48	313745000	204646297	221890000
SUMATERA UTARA	2006	6,77	4865107	6,20	539718000	243124712	645945000
SUMATERA UTARA	2007	6,95	5065206	6,90	657357000	293724298	967383000
SUMATERA UTARA	2008	11,37	5452339	6,39	727910822	311139304	0
SUMATERA UTARA	2009	2,22	5783207	5,07	761054820	360207672	46303000
SUMATERA UTARA	2010	9,15	6007819	6,42	812747639	405841910	29137700
SUMATERA UTARA	2011	4,04	5774196	6,66	948867504	386544541	38485500
SUMATERA UTARA	2012	2,84	6067628	6,45	1103389237	460163933	41628360
SUMATERA UTARA	2013	10	6151474	6,07	1223445404	432333704	54823448
SUMATERA UTARA	2014	7,98	6122647	5,23	1349132276	477716007	59728388
SUMATERA UTARA	2015	2,92	6066839	5,10	1139261371	334244917	47746880
SUMATERA UTARA	2016	5,76	6078389	5,18	1604505673	511083220	3103684863
SUMATERA UTARA	2017	3,3	6326143	5,12	2629224545	460857334	3838053061
SUMATERA UTARA	2018	2,06	7080803	5,18	2629224545	513849017	3912060868
SUMATERA UTARA	2019	2,2	7189774	5,22	2713750553	550587678	4205592917
SUMATERA BARAT	2002	10,22	1712032	4,69	193520000	42058027	9061594
SUMATERA BARAT	2003	5,55	1777717	5,26	227630000	49805643	4700000
SUMATERA BARAT	2004	6,98	1768366	5,47	234249000	62014749	132540000
SUMATERA BARAT	2005	20,47	1727381	5,73	247487000	62579307	191240000
SUMATERA BARAT	2006	8,05	1772694	6,14	477029000	77202885	466475000
SUMATERA BARAT	2007	6,90	1834305	6,34	546332000	87533693	746945000

SUMATERA BARAT	2008	12,68	1937711	6,88	631791704	87843372	24567000
SUMATERA BARAT	2009	2,05	2003818	4,28	648943012	93717822	47179000
SUMATERA BARAT	2010	7,84	2071241	5,94	662403385	108756199	14415375
SUMATERA BARAT	2011	5,37	2099136	6,26	764680895	92226684	40733300
SUMATERA BARAT	2012	4,16	2167927	6,31	918560365	192834767	32500720
SUMATERA BARAT	2013	10,87	2179743	6,08	1039922511	137015381	63941975
SUMATERA BARAT	2014	10,57	2262401	5,88	1129886306	175930500	54108200
SUMATERA BARAT	2015	1,82	2258375	5,53	1221128606	107016709	62731100
SUMATERA BARAT	2016	4,48	2387633	5,27	1261915864	134500315	1180338806
SUMATERA BARAT	2017	1,74	2405473	5,30	2014646639	152435927	1699580667
SUMATERA BARAT	2018	2,77	2571866	5,14	2014646639	131766542	1784401030
SUMATERA BARAT	2019	1,52	2581540	5,01	2076398191	148883004	1844831704
RIAU	2002	11,66	2032087	2,66	110710000	917620220	65462522
RIAU	2003	6,65	2080353	2,45	74210000	1076686013	0
RIAU	2004	8,92	2025966	2,93	61628000	1187087798	8000000
RIAU	2005	17,10	1702913	5,41	92157000	1691586461	8330000
RIAU	2006	6,32	1702460	5,15	92158000	2396907459	161575000
RIAU	2007	7,53	1800957	3,41	277659000	1858286285	211369000
RIAU	2008	11,66	2040624	5,65	198375199	2488988627	0
RIAU	2009	1,37	2082656	2,97	171850958	1707297842	0
RIAU	2010	8,03	2174325	4,21	58869157	24049198035	22368500
RIAU	2011	4,09	2358450	5,57	380051124	2789961857	56823400
RIAU	2012	3,28	2440654	3,76	489179914	3067171447	62491370
RIAU	2013	8,720	2586568	2,48	726630916	2844812994	38738320

RIAU	2014	9,04	2589906	2,71	820984584	2773769579	43737510
RIAU	2015	2,47	2664271	0,22	654220250	1831045031	63362192
RIAU	2016	3,58	2783618	2,18	738378737	1664572707	1421530289
RIAU	2017	4,4	2864446	2,66	1457997067	1473538188	1607851462
RIAU	2018	2,34	2988052	2,35	1465117720	1721610680	1641194885
RIAU	2019	2,07	3016278	2,81	1548578928	1953509771	1913695540
JAMBI	2002	12,62	1094331	5,86	181920000	51026044	19101629
JAMBI	2003	3,79	1101833	5,00	209250000	70494584	7400000
JAMBI	2004	7,25	1137460	5,38	223347000	132131094	87220000
JAMBI	2005	16,50	1105179	5,57	243618000	150070552	110540000
JAMBI	2006	10,66	1101985	5,89	374361000	250713108	200355000
JAMBI	2007	7,42	1159365	6,82	415018000	271538647	24454000
JAMBI	2008	11,57	1203578	7,16	468803682	1426072513	35121000
JAMBI	2009	1,85	1266556	6,39	47350587	293433401	20300000
JAMBI	2010	10,52	1376556	7,35	488743471	423432189	20030000
JAMBI	2011	2,76	1433620	7,86	583882413	466589706	24735600
JAMBI	2012	4,22	1466804	7,03	731952242	567517307	33109538
JAMBI	2013	8,74	1471154	6,84	836578062	599946012	53328486
JAMBI	2014	8,86	1511051	7,36	948337712	633754564	49355510
JAMBI	2015	1,33	1598292	4,21	1009165864	351969164	57944770
JAMBI	2016	3,83	1620850	4,37	1070452478	246192869	81644852
JAMBI	2017	3,47	1692198	4,60	1397912161	390520755	934827673
JAMBI	2018	2,74	1754593	4,69	1399367134	406804974	939049860
JAMBI	2019	1,95	1702559	4,37	1433203410	440002054	1067008374

SUMATERA SELATAN	2002	12,25	3141774	3,08	211530000	226861040	5023793
SUMATERA SELATAN	2003	5,03	3144446	3,68	231930000	247718407	20294591
SUMATERA SELATAN	2004	8,94	3091740	4,63	224874000	351105889	57160000
SUMATERA SELATAN	2005	19,92	2993446	4,84	242707000	544111756	66570000
SUMATERA SELATAN	2006	8,44	2993049	5,20	421381000	702874237	312805000
SUMATERA SELATAN	2007	8,21	3047702	5,84	510197000	770700605	459848000
SUMATERA SELATAN	2008	11,15	3176806	5,07	545776133	878797554	0
SUMATERA SELATAN	2009	2,88	3196330	4,11	5073558835	825805443	0
SUMATERA SELATAN	2010	6,02	3401626	5,63	512083577	1293168560	17807100
SUMATERA SELATAN	2011	3,78	3489692	6,36	646813301	1313456699	32287000
SUMATERA SELATAN	2012	2,72	3659896	6,83	716153261	1617243960	45401430
SUMATERA SELATAN	2013	7,04	3631253	5,31	870516767	1753511287	25188400
SUMATERA SELATAN	2014	8,86	3780239	4,79	985542760	2793113988	62754900
SUMATERA SELATAN	2015	3,26	3755755	4,42	931915470	1328407541	69405320
SUMATERA SELATAN	2016	3,21	3946409	5,04	1071421391	1286710763	148180327
SUMATERA SELATAN	2017	3,4	4012876	5,51	1697897817	1507731846	855483709
SUMATERA SELATAN	2018	2,6	4123853	6,01	1697762032	1643957686	2171297782
SUMATERA SELATAN	2019	2,07	4113689	5,69	1743742960	2133731672	2259489237
BENGGKULU	2002	10,11	749490	4,73	162550000	11004647	2753172
BENGGKULU	2003	4,14	764191	5,37	208840000	13873080	6200000
BENGGKULU	2004	4,67	720036	5,38	222618000	16988415	47220000
BENGGKULU	2005	25,22	742847	5,82	230653000	23490754	85220000
BENGGKULU	2006	6,52	760645	5,95	378050000	13110410	292780000
BENGGKULU	2007	5,00	795239	6,46	405858000	39798243	402383000

BENGKULU	2008	13,44	786803	5,75	482472811	39693145	7618800
BENGKULU	2009	4,18	804507	5,62	487339494	48881382	53277000
BENGKULU	2010	9,08	829285	6,10	523041290	54774236	20983900
BENGKULU	2011	3,96	855598	6,85	607388036	68258659	36309600
BENGKULU	2012	4,61	881957	6,83	775311166	79064897	28620610
BENGKULU	2013	9,94	879747	6,07	854647828	71112796	51587330
BENGKULU	2014	10,85	910626	5,48	955095187	65554394	53927020
BENGKULU	2015	3,25	924099	5,13	1046080820	99011345	63893200
BENGKULU	2016	5	963244	5,28	1070751292	77348428	468362410
BENGKULU	2017	3,56	968768	4,98	1301538847	61311708	635034086
BENGKULU	2018	2,35	1009829	4,97	1300978160	66368735	110698384
BENGKULU	2019	2,88	1019239	4,94	1334178390	73043781	148677988
LAMPUNG	2002	10,32	3033305	5,62	211110000	117073700	5023793
LAMPUNG	2003	5,44	3053890	5,76	263465793	125383226	4600000
LAMPUNG	2004	5,22	3132126	5,07	286822000	123953132	92540000
LAMPUNG	2005	21,17	3107296	4,02	285761834	210468038	9901000
LAMPUNG	2006	6,03	3085234	4,98	460898000	202068877	308390000
LAMPUNG	2007	6,58	3223250	5,94	509656000	177128795	455375000
LAMPUNG	2008	14,82	3371169	5,35	570533930	224370694	22728000
LAMPUNG	2009	2,17	3447285	5,26	628505673	160504618	40016000
LAMPUNG	2010	9,95	3633624	5,88	643376134	237470234	27573800
LAMPUNG	2011	4,24	3519657	6,56	769973038	251104017	42210200
LAMPUNG	2012	4,3	3649995	6,44	939139287	310624595	31087640
LAMPUNG	2013	7,56	3619897	5,77	1060663183	263272124	60108230



LAMPUNG	2014	7,43	3748696	5,08	1136053041	287051423	48851620
LAMPUNG	2015	3,66	3778223	5,13	1097129439	172095690	245066400
LAMPUNG	2016	2,84	3893068	5,14	1321679032	185475997	1651557871
LAMPUNG	2017	2,73	3989181	5,16	1851595354	249340043	1927384230
LAMPUNG	2018	2,28	4238374	5,23	1854701094	216041063	745585221
LAMPUNG	2019	3,21	4265809	5,26	1906780297	146349895	581870717
KEP. BANGKA BELITUNG	2002	9,21	400872	6,75	146220000	16576287	343045
KEP. BANGKA BELITUNG	2003	4,79	414968	11,93	162490000	35153198	5900000
KEP. BANGKA BELITUNG	2004	9,00	441355	3,28	170227000	39724010	39790000
KEP. BANGKA BELITUNG	2005	17,44	439203	3,47	187358000	59641992	41780000
KEP. BANGKA BELITUNG	2006	6,42	438358	3,98	275690000	60310327	178440000
KEP. BANGKA BELITUNG	2007	2,64	474455	4,54	319357000	86969724	266757000
KEP. BANGKA BELITUNG	2008	18,40	482659	4,60	391045440	135066331	19826100
KEP. BANGKA BELITUNG	2009	1,88	517800	3,74	407994844	104318329	45563000
KEP. BANGKA BELITUNG	2010	9,36	556264	5,99	410642308	100574468	8071800
KEP. BANGKA BELITUNG	2011	5	572246	6,90	481589915	201039549	17880900
KEP. BANGKA BELITUNG	2012	6,57	591303	5,50	634087815	162276531	25135650
KEP. BANGKA BELITUNG	2013	8,71	618594	5,20	717140118	146525227	44170570
KEP. BANGKA BELITUNG	2014	9,98	613991	4,67	806820146	276446266	43372460
KEP. BANGKA BELITUNG	2015	2,77	646352	4,08	897887443	188157236	44355816
KEP. BANGKA BELITUNG	2016	6,35	666040	4,10	905526208	142860016	77898689
KEP. BANGKA BELITUNG	2017	3,32	684303	4,47	980297314	120836219	438826470
KEP. BANGKA BELITUNG	2018	3,09	708070	4,45	1018435175	215555879	460227705
KEP. BANGKA BELITUNG	2019	2,75	702709	3,32	1046862622	228805440	491156874

KEP. RIAU	2002	9,14	0	0,00	0	0	0
KEP. RIAU	2003	4,27	0	0,00	0	0	0
KEP. RIAU	2004	4,22	254606	6,47	2713000	87684569	0
KEP. RIAU	2005	14,79	509213	6,57	25963000	97920302	10000000
KEP. RIAU	2006	4,58	514509	6,78	178330990	974596110	81760000
KEP. RIAU	2007	4,84	559476	7,01	333332994	329006589	149424000
KEP. RIAU	2008	10,15	604913	6,63	288884858	655605790	5801000
KEP. RIAU	2009	1,96	621365	3,52	403132480	652989577	20931000
KEP. RIAU	2010	6,79	711249	7,19	310161843	996072235	4558900
KEP. RIAU	2011	3,54	771040	6,96	395745542	829255428	21903200
KEP. RIAU	2012	2,97	806987	7,63	460857807	1110423502	23165600
KEP. RIAU	2013	8,95	827041	7,21	656067610	1060969973	36672910
KEP. RIAU	2014	7,55	832372	6,60	698009318	1131581396	41678090
KEP. RIAU	2015	3,6	825549	6,02	695943711	507640852	42537210
KEP. RIAU	2016	3,34	845126	4,98	866810696	521708952	76384932
KEP. RIAU	2017	3,75	941275	1,98	1059822693	526669662	569776571
KEP. RIAU	2018	3,01	986618	4,47	1150516796	537458003	590028178
KEP. RIAU	2019	2,69	1006843	4,84	1190057596	468124457	645650637
JAWA BARAT	2002	10,93	14417739	3,76	393880000	437404765	0
JAWA BARAT	2003	4,31	14345796	4,67	429570000	519011196	0
JAWA BARAT	2004	5,58	14618934	4,77	573778000	623885954	130530000
JAWA BARAT	2005	19,08	14637107	5,60	570660000	649460700	117910000
JAWA BARAT	2006	6,69	14986799	6,02	565753000	733042160	685680000
JAWA BARAT	2007	6,95	15420799	6,48	933436000	822658285	808599000

JAWA BARAT	2008	11,98	16322615	6,21	904358915	999370911	0
JAWA BARAT	2009	2,94	16844447	4,19	984297824	1188431404	0
JAWA BARAT	2010	6,38	17062626	6,20	1086123940	1303163221	38570300
JAWA BARAT	2011	3,38	17866741	6,50	1181553108	1298760319	45764600
JAWA BARAT	2012	3,84	18508944	6,50	1269960760	1514429569	48356290
JAWA BARAT	2013	8,53	18815809	6,33	1472453011	1398007485	80072050
JAWA BARAT	2014	7,62	19337363	5,09	1687686386	1054356759	78215030
JAWA BARAT	2015	2,57	19624186	5,05	1303654355	1184319133	18904024
JAWA BARAT	2016	2,68	19739575	5,66	1248112172	1778216936	7596342336
JAWA BARAT	2017	3,9	20636957	5,33	3011001477	1851522980	9118920858
JAWA BARAT	2018	3,23	20995673	5,65	3023552986	1804540602	9379906816
JAWA BARAT	2019	2,75	22103586	5,07	3212647404	1388997920	10018939411
JAWA TENGAH	2002	10,56	15154856	3,55	232479050	345621446	0
JAWA TENGAH	2003	4,60	15275796	4,98	509870000	206665646	0
JAWA TENGAH	2004	5,68	15528110	5,13	553064000	236012690	212580000
JAWA TENGAH	2005	15,82	15558350	5,35	549956000	257176660	295990000
JAWA TENGAH	2006	7,11	15747596	5,33	890420000	295440720	897170000
JAWA TENGAH	2007	6,27	16302383	5,59	1050732000	368610557	1293711000
JAWA TENGAH	2008	9,47	15784843	5,61	1053491871	450692147	0
JAWA TENGAH	2009	3,79	15618439	5,14	1130742601	557673479	3437000
JAWA TENGAH	2010	6,63	15882741	5,84	1168787757	614565942	28304250
JAWA TENGAH	2011	2,7	16045041	5,30	1276180223	622219342	51789800
JAWA TENGAH	2012	3,89	16466938	5,34	1516892951	751282699	50630450
JAWA TENGAH	2013	7,7	16456362	5,11	1670859369	714432750	82522510

JAWA TENGAH	2014	7,97	16650829	5,27	1803931189	723804733	79165240
JAWA TENGAH	2015	2,92	16878584	5,47	1629429283	569741071	57972640
JAWA TENGAH	2016	2,45	16836595	5,25	1895907223	893673222	5263717151
JAWA TENGAH	2017	3,88	17315123	5,26	3652586431	848309911	6566890149
JAWA TENGAH	2018	2,93	17526972	5,30	3652586431	769449921	6511740480
JAWA TENGAH	2019	2,63	17785781	5,40	3784512513	786265656	6974422226
DI YOGYAKARTA	2002	12,01	1644190	4,50	214480000	26447802	0
DI YOGYAKARTA	2003	5,73	1692040	4,58	201960000	31160045	5500000
DI YOGYAKARTA	2004	6,95	1701802	5,12	248049000	35219472	45660000
DI YOGYAKARTA	2005	14,98	1734047	4,73	238692000	38545968	51410000
DI YOGYAKARTA	2006	10,40	1752763	3,70	402484000	40398532	126495000
DI YOGYAKARTA	2007	7,99	1804894	4,31	437379000	43543835	175934000
DI YOGYAKARTA	2008	9,88	1877976	5,03	511773394	70560773	19468000
DI YOGYAKARTA	2009	3,60	1910639	4,43	523919948	73681173	33410000
DI YOGYAKARTA	2010	7,38	1858956	4,88	527471247	87821992	11384100
DI YOGYAKARTA	2011	3,88	1851687	5,21	620812328	82037725	19489600
DI YOGYAKARTA	2012	4,31	1892972	5,37	757056696	118434889	19052740
DI YOGYAKARTA	2013	7,32	1882283	5,47	828334768	94731183	34495900
DI YOGYAKARTA	2014	6,59	1972478	5,17	899923550	101565866	37131610
DI YOGYAKARTA	2015	3,09	1951922	4,95	920544722	62257506	39084040
DI YOGYAKARTA	2016	2,29	2040132	5,05	940835434	113065429	643207673
DI YOGYAKARTA	2017	4,2	2054530	5,26	1314372147	98483456	96700859
DI YOGYAKARTA	2018	2,66	2133048	6,20	1314262108	93142566	910032137
DI YOGYAKARTA	2019	2,73	2174519	6,59	1351102020	89553564	978540310

JAWA TIMUR	2002	9,39	17011512	3,80	453210000	293550390	0
JAWA TIMUR	2003	3,59	17056322	4,78	414318000	366243188	0
JAWA TIMUR	2004	6,24	17374955	5,83	463328000	399181974	241260000
JAWA TIMUR	2005	15,89	17679076	5,84	454635000	455231655	257630000
JAWA TIMUR	2006	6,81	17816142	5,80	820773000	555975105	914090000
JAWA TIMUR	2007	6,58	18409473	6,11	1091155000	664741027	1362150000
JAWA TIMUR	2008	10,53	18871819	5,94	1022860627	775290376	0
JAWA TIMUR	2009	3,41	19214139	5,01	1118478350	957077059	18001000
JAWA TIMUR	2010	6,84	19154824	6,68	1212934765	1175387897	56982200
JAWA TIMUR	2011	3,75	18951550	6,44	1347501699	1125553551	56031200
JAWA TIMUR	2012	4,65	19264872	6,64	1491561136	1523964906	53490060
JAWA TIMUR	2013	7,55	19569700	6,08	1496594268	1374728955	48047785
JAWA TIMUR	2014	7,48	19595949	5,86	1866548185	1491306547	101875970
JAWA TIMUR	2015	2,55	19584086	5,44	1587261707	1462318221	66039190
JAWA TIMUR	2016	2,12	19381614	5,57	1672878372	1849884362	5516240625
JAWA TIMUR	2017	3,7	20066760	5,46	3803428371	1634524587	7056095687
JAWA TIMUR	2018	2,59	20718784	5,47	3813411928	2624231241	6858141681
JAWA TIMUR	2019	2,05	21093190	5,52	3998431715	2973216567	7551054472
BANTEN	2002	9,68	3217192	4,11	155589910	264970222	0
BANTEN	2003	5,21	3210160	5,07	171859752	322053272	2815894
BANTEN	2004	6,40	3289823	5,63	187863000	330624669	36930000
BANTEN	2005	16,11	3286227	5,88	198018000	324469103	50230000
BANTEN	2006	7,67	3248414	5,57	245294000	220083434	99680000
BANTEN	2007	6,31	3361233	6,04	330597000	277207085	193987000

BANTEN	2008	12,54	3660710	5,77	342743861	325810205	18097000
BANTEN	2009	2,45	3748802	4,71	361179087	351666426	32121000
BANTEN	2010	6,13	4198900	6,11	381979019	417014555	13660600
BANTEN	2011	2,97	4431625	7,03	460383683	343927421	45179600
BANTEN	2012	4,25	4760430	6,83	530833378	454584590	29687200
BANTEN	2013	9,05	4835660	6,67	617081101	498321858	10601213
BANTEN	2014	10,41	4896043	5,51	728490012	405819000	12538478
BANTEN	2015	4,3	5016792	5,45	640981003	319017535	16789048
BANTEN	2016	3,38	5161386	5,28	693738580	493494030	1998321331
BANTEN	2017	4,64	5292178	5,75	1059320237	640348609	2230361117
BANTEN	2018	3,32	5493587	5,77	1072903468	650605097	2254780861
BANTEN	2019	3,25	5613132	5,29	1140003353	711779997	2489732034
BALI	2002	10,23	1774315	3,03	168160000	43060087	0
BALI	2003	3,19	1797405	3,58	184869965	46651175	5121084
BALI	2004	6,29	1835165	4,62	192805720	44132414	72030000
BALI	2005	14,52	1920668	5,56	199924000	61440428	90210000
BALI	2006	4,24	1858556	5,28	353306000	68290130	235590000
BALI	2007	7,34	1946914	5,92	436533000	88771234	348377000
BALI	2008	11,13	2014458	5,97	448187419	115383052	12980400
BALI	2009	3,76	2028786	5,33	471788221	128712266	36108000
BALI	2010	9,59	2109348	5,83	489942535	150963833	8351325
BALI	2011	5,07	2193215	6,66	560673539	128698319	15916275
BALI	2012	4,41	2248128	6,96	694079080	180266157	34025910
BALI	2013	8,31	2285951	6,69	792365876	144513544	43835380

BALI	2014	8,51	2325013	6,73	832297473	191634801	41600750
BALI	2015	2,97	2374989	6,03	831597268	104103309	134496571
BALI	2016	3,33	2374310	6,33	850144224	171994343	844872363
BALI	2017	3,43	2417901	5,56	1260842523	169597185	1105556047
BALI	2018	2,81	2573052	6,31	1268585388	182554550	1042840035
BALI	2019	2,18	2508433	5,60	1325847555	185994009	1095683760
NUSA TENGGARA BARAT	2002	7,96	1868188	3,51	194098906	52325105	1878170
NUSA TENGGARA BARAT	2003	1,82	1967651	3,90	223950000	57564870	8500000
NUSA TENGGARA BARAT	2004	6,61	1844636	6,07	231537000	62798979	69020000
NUSA TENGGARA BARAT	2005	17,72	1784775	1,71	249887000	76069114	103280000
NUSA TENGGARA BARAT	2006	4,72	1880634	2,77	404145000	71700485	291010000
NUSA TENGGARA BARAT	2007	8,76	1952939	4,91	447658000	86795304	373898000
NUSA TENGGARA BARAT	2008	14,51	1935192	2,82	511286478	78492695	37215000
NUSA TENGGARA BARAT	2009	4,15	1941307	12,14	554431964	98719980	48024000
NUSA TENGGARA BARAT	2010	8,15	2068357	6,35	573065430	158426609	24764400
NUSA TENGGARA BARAT	2011	7,19	2024759	-3,91	646671083	162674616	45965400
NUSA TENGGARA BARAT	2012	3,61	2056591	-1,54	809617715	191526128	53326340
NUSA TENGGARA BARAT	2013	10,42	2100135	5,16	859353026	158244270	57407690
NUSA TENGGARA BARAT	2014	7,37	2152761	5,17	980390340	180222019	54663430
NUSA TENGGARA BARAT	2015	4,11	2209178	21,76	1088633717	147804398	214257150
NUSA TENGGARA BARAT	2016	3,11	2331376	5,81	1117691709	375036425	1090304456
NUSA TENGGARA BARAT	2017	4,08	2370085	0,09	1537777886	346522445	1384626963
NUSA TENGGARA BARAT	2018	3,22	2382953	-4,50	1537777886	261642854	1412965950
NUSA TENGGARA BARAT	2019	2,27	2530511	3,90	1583746053	237759336	1573794788

NUSA TENGGARA TIMUR	2002	9,77	1852866	4,93	244030000	20054348	0
NUSA TENGGARA TIMUR	2003	5,45	1903218	4,59	283040000	22545359	6000000
NUSA TENGGARA TIMUR	2004	8,28	1956014	5,34	305474000	28461257	136600000
NUSA TENGGARA TIMUR	2005	15,16	1998617	3,46	305473775	44477572	212290000
NUSA TENGGARA TIMUR	2006	9,72	1987771	5,08	479436000	48713441	492045000
NUSA TENGGARA TIMUR	2007	8,44	2012436	5,15	553589000	54739369	701450000
NUSA TENGGARA TIMUR	2008	10,90	2107608	4,84	616601854	53820334	38318400
NUSA TENGGARA TIMUR	2009	6,49	2219382	4,29	652757003	55076611	59733000
NUSA TENGGARA TIMUR	2010	9,97	2183001	5,25	674635569	68910551	30249498
NUSA TENGGARA TIMUR	2011	5,46	2114197	5,67	752057444	87834595	47399400
NUSA TENGGARA TIMUR	2012	5,8	2178603	5,46	940646764	100884155	57088950
NUSA TENGGARA TIMUR	2013	7,54	2198482	5,41	1003991703	84034260	77822660
NUSA TENGGARA TIMUR	2014	6,16	2255220	5,05	1131687590	84494873	74235910
NUSA TENGGARA TIMUR	2015	4,48	2274913	4,92	1300445875	60821838	100654710
NUSA TENGGARA TIMUR	2016	2,97	2317346	5,12	1337091848	91213202	1411352709
NUSA TENGGARA TIMUR	2017	1,88	2371435	5,11	1784462326	87876729	1771353807
NUSA TENGGARA TIMUR	2018	2,62	2672890	5,11	1827412640	64495737	1788419259
NUSA TENGGARA TIMUR	2019	1,16	2648712	5,24	1875182301	63170495	2154410338
KALIMANTAN BARAT	2002	8,61	1883117	4,55	228280000	39919103	31668448
KALIMANTAN BARAT	2003	5,48	1931147	3,12	272910000	42433320	8600000
KALIMANTAN BARAT	2004	6,06	1790070	4,79	294411000	52443224	99150000
KALIMANTAN BARAT	2005	14,43	1840284	3,73	312572000	66111287	145910000
KALIMANTAN BARAT	2006	6,32	1892091	5,23	586027000	83224793	352960000
KALIMANTAN BARAT	2007	8,56	2019452	6,02	610890000	100717636	600488000



KALIMANTAN BARAT	2008	11,93	2032943	5,45	728080795	106026967	31095419
KALIMANTAN BARAT	2009	3,03	2105605	4,80	744834145	172558026	53314000
KALIMANTAN BARAT	2010	7,81	2123976	5,47	755123093	135894389	29618800
KALIMANTAN BARAT	2011	5,82	2168113	5,50	845483888	154006771	38369500
KALIMANTAN BARAT	2012	5,42	2225634	5,91	1023229807	182691160	43913040
KALIMANTAN BARAT	2013	7,82	2217727	6,05	1144712840	163157232	74172390
KALIMANTAN BARAT	2014	9,52	2267911	5,03	1290222856	157997703	63189480
KALIMANTAN BARAT	2015	5,09	2246590	4,88	1405594169	153476959	85584200
KALIMANTAN BARAT	2016	3,23	2296474	5,20	1493486253	167535551	199767934
KALIMANTAN BARAT	2017	4,55	2351286	5,17	1720698207	170188840	1529204325
KALIMANTAN BARAT	2018	3,59	2478535	5,07	1724402496	212226512	1508354942
KALIMANTAN BARAT	2019	1,87	2495699	5,09	1756069684	227170469	1686329826
KALIMANTAN TENGAH	2002	8,39	845594	5,30	204840000	60968948	129804663
KALIMANTAN TENGAH	2003	4,37	856817	4,91	253600000	53438678	6900000
KALIMANTAN TENGAH	2004	6,96	813726	5,56	274597000	74617595	94430000
KALIMANTAN TENGAH	2005	12,01	897541	5,90	287575612	85038977	174810000
KALIMANTAN TENGAH	2006	7,74	968015	5,84	552000000	121708294	378720000
KALIMANTAN TENGAH	2007	7,77	1005598	6,06	571290000	155284032	377217000
KALIMANTAN TENGAH	2008	10,27	1004205	6,17	670213090	149278295	40179000
KALIMANTAN TENGAH	2009	2,12	1015393	5,57	694822206	158943521	59296000
KALIMANTAN TENGAH	2010	9,51	1040431	6,50	707880493	181048474	32296200
KALIMANTAN TENGAH	2011	4,44	1093629	7,01	795816335	294570780	51915000
KALIMANTAN TENGAH	2012	5,71	1133244	6,87	951256068	316661424	50184280
KALIMANTAN TENGAH	2013	6,85	1155047	7,37	1062516940	302025000	63299310

KALIMANTAN TENGAH	2014	7,27	1184237	6,21	1152428738	320254879	61929830
KALIMANTAN TENGAH	2015	4,96	1231153	7,01	1280595848	342879620	72525960
KALIMANTAN TENGAH	2016	2,19	1243433	6,35	1294850243	372437952	241247658
KALIMANTAN TENGAH	2017	3,2	1275289	6,73	1574382856	582760140	644057087
KALIMANTAN TENGAH	2018	4,85	1329748	5,61	1574382856	613673453	750824890
KALIMANTAN TENGAH	2019	2,35	1343696	6,12	1603623745	607966431	961814107
KALIMANTAN SELATAN	2002	8,50	1449882	3,80	161799950	123794437	4766353
KALIMANTAN SELATAN	2003	4,93	1495047	4,37	204374788	68385101	5700000
KALIMANTAN SELATAN	2004	6,51	1561810	5,03	209678992	92179889	95430000
KALIMANTAN SELATAN	2005	13,22	1490753	5,06	238366970	149688734	159490000
KALIMANTAN SELATAN	2006	7,03	1456956	4,98	378666000	216296169	32660000
KALIMANTAN SELATAN	2007	8,16	1543131	6,01	427994000	195589487	406319000
KALIMANTAN SELATAN	2008	11,10	1632450	6,45	466559207	288399052	36039000
KALIMANTAN SELATAN	2009	2,58	1670541	5,29	484059666	477577999	43352000
KALIMANTAN SELATAN	2010	8,66	1740994	5,59	458074767	452212507	19837300
KALIMANTAN SELATAN	2011	3,98	1757503	6,97	504876152	653442462	37246400
KALIMANTAN SELATAN	2012	5,96	1824670	5,97	504876152	843080216	37246400
KALIMANTAN SELATAN	2013	6,98	1855637	5,33	652535312	780058338	38848250
KALIMANTAN SELATAN	2014	7,98	1901971	4,84	683511441	647375000	41553540
KALIMANTAN SELATAN	2015	5,86	1928999	3,82	701725536	940976170	54189940
KALIMANTAN SELATAN	2016	2,93	1971463	4,40	571244699	1044507972	63890470
KALIMANTAN SELATAN	2017	3,11	2025824	5,28	779517454	635201531	271304779
KALIMANTAN SELATAN	2018	2,62	2086343	5,08	1106532187	932678930	970490213
KALIMANTAN SELATAN	2019	3,12	2118708	4,08	1118213289	891426659	935797533

KALIMANTAN TIMUR	2002	10,82	1014525	1,74	96960000	1250534285	182705407
KALIMANTAN TIMUR	2003	6,96	1104157	1,86	76410000	1500780205	1631242
KALIMANTAN TIMUR	2004	6,63	1041494	1,75	266775000	1560390086	5000000
KALIMANTAN TIMUR	2005	16,96	1098715	3,17	265592000	2526721824	56140000
KALIMANTAN TIMUR	2006	6,01	1117243	2,85	72548000	3393317506	213100000
KALIMANTAN TIMUR	2007	8,23	1095739	1,84	235743000	2860709203	271789000
KALIMANTAN TIMUR	2008	12,00	1183285	4,90	126235249	3923951429	340632000
KALIMANTAN TIMUR	2009	3,83	1313071	2,28	18159327	3100091127	3811000
KALIMANTAN TIMUR	2010	7,19	1428231	5,10	164514	4274656661	33643200
KALIMANTAN TIMUR	2011	6,34	1523698	6,47	51446845	5206240970	38188100
KALIMANTAN TIMUR	2012	5,61	1624308	5,48	52637761	5984332195	34616130
KALIMANTAN TIMUR	2013	9,47	1650327	-6,62	55539336	5272171974	8047840
KALIMANTAN TIMUR	2014	7,09	1715191	1,71	57312515	6127355949	1037925
KALIMANTAN TIMUR	2015	5,25	1477274	-1,20	0	3805373705	218651350
KALIMANTAN TIMUR	2016	3,48	1542686	-0,38	80402179	2844821387	1016430395
KALIMANTAN TIMUR	2017	3,07	1537986	3,13	714906576	1710695087	291494490
KALIMANTAN TIMUR	2018	3,23	1659904	2,64	767682423	2991231125	338681844
KALIMANTAN TIMUR	2019	1,69	1732438	4,74	815693641	3038477122	342324842
SULAWESI UTARA	2002	15,22	797923	3,33	269758774	18168527	2879813
SULAWESI UTARA	2003	0,69	796722	3,19	242328520	22850317	6700000
SULAWESI UTARA	2004	4,69	873436	4,26	220626000	24308087	70340000
SULAWESI UTARA	2005	18,73	844725	5,35	247873000	27606569	110200000
SULAWESI UTARA	2006	5,09	841925	5,72	404324000	38031948	314210000
SULAWESI UTARA	2007	10,13	926569	6,47	447094538	49402223	501621000

SULAWESI UTARA	2008	9,71	914781	10,86	532916167	52571361	28079000
SULAWESI UTARA	2009	2,31	951400	7,85	558634931	62753871	52879000
SULAWESI UTARA	2010	6,28	949294	7,16	558781013	74309883	17439200
SULAWESI UTARA	2011	0,67	964663	6,17	619711007	80361935	29288200
SULAWESI UTARA	2012	6,04	1007039	6,86	790534491	99292276	43539930
SULAWESI UTARA	2013	8,12	998804	6,38	885684277	89912140	54346140
SULAWESI UTARA	2014	9,67	1027970	6,31	949852622	100000000	59675060
SULAWESI UTARA	2015	5,56	1038849	6,12	1026948809	69347788	76744790
SULAWESI UTARA	2016	0,35	1100972	6,16	1065545204	102721458	712639625
SULAWESI UTARA	2017	2,44	1111369	6,31	1390272639	109560617	1008208366
SULAWESI UTARA	2018	3,83	1158226	6,00	1427544997	120758521	956923255
SULAWESI UTARA	2019	2,69	1149287	5,65	1463436158	125572965	1044216782
SULAWESI TENGAH	2002	13,36	986541	5,62	19051000	14848194	9940963
SULAWESI TENGAH	2003	5,84	976976	6,21	240699999	17249229	7380777
SULAWESI TENGAH	2004	7,01	975932	7,15	258145000	23990368	90720000
SULAWESI TENGAH	2005	16,33	986192	7,57	271756000	37705557	119710000
SULAWESI TENGAH	2006	8,69	998448	7,82	477668000	44242355	286430000
SULAWESI TENGAH	2007	8,13	1057770	7,99	502128996	59963466	467964000
SULAWESI TENGAH	2008	10,40	1131367	7,78	606544317	56566868	38778644
SULAWESI TENGAH	2009	5,73	1161404	7,71	629397186	66985027	60057000
SULAWESI TENGAH	2010	6,40	1194103	8,74	659331271	71244194	28596800
SULAWESI TENGAH	2011	4,47	1258621	9,82	743161759	82757807	38179100
SULAWESI TENGAH	2012	5,87	1293727	9,53	902087729	97601766	43237070
SULAWESI TENGAH	2013	7,57	1296531	9,59	994658685	100189502	65949350

SULAWESI TENGAH	2014	8,85	1339665	5,07	1087885014	85800177	63942480
SULAWESI TENGAH	2015	4,17	1355669	15,50	1221602865	85165410	250986290
SULAWESI TENGAH	2016	1,49	1451432	9,94	1272925036	102058132	835621352
SULAWESI TENGAH	2017	4,33	1442498	7,10	1546247611	124837811	976155892
SULAWESI TENGAH	2018	6,46	1515735	20,60	1586163908	196347609	948918647
SULAWESI TENGAH	2019	2,3	1494344	8,83	1637588970	205582624	1207098898
SULAWESI SELATAN	2002	8,25	3084382	4,08	257480331	76237191	9685303
SULAWESI SELATAN	2003	3,01	3115269	5,42	298150000	101932669	3400000
SULAWESI SELATAN	2004	6,47	3183652	5,26	313614000	133129220	257950000
SULAWESI SELATAN	2005	15,20	3177998	6,05	332725000	143947728	331400000
SULAWESI SELATAN	2006	7,21	2687023	6,72	509538000	168327697	649785000
SULAWESI SELATAN	2007	5,71	2879681	6,34	599508000	210518105	735401000
SULAWESI SELATAN	2008	14,23	3034602	7,78	656710943	203086438	35137000
SULAWESI SELATAN	2009	3,92	3158811	6,23	663422394	206231440	44849000
SULAWESI SELATAN	2010	5,84	3274444	8,19	706276399	224389793	29276302
SULAWESI SELATAN	2011	2,94	3377038	8,13	816757969	248345220	41886000
SULAWESI SELATAN	2012	3,96	3441828	8,87	996939584	309478527	42774470
SULAWESI SELATAN	2013	6,17	3431995	7,62	1089771438	268130039	64264340
SULAWESI SELATAN	2014	8,9	3495878	7,54	1209598741	292486296	72976480
SULAWESI SELATAN	2015	2,66	3511526	7,19	1180010167	188057830	222686392
SULAWESI SELATAN	2016	2,2	3638335	7,42	1394148361	314343523	1991324790
SULAWESI SELATAN	2017	4,41	3700035	7,21	2509480255	279526930	2565500203
SULAWESI SELATAN	2018	3,63	4101115	7,04	2509480255	237746372	2540292651
SULAWESI SELATAN	2019	2,12	4115389	6,91	2586312342	279763771	2632211447

SULAWESI TENGGARA	2002	10,35	792727	6,66	176370000	13008000	1979633
SULAWESI TENGGARA	2003	2,41	836874	7,57	226429500	20178535	6899900
SULAWESI TENGGARA	2004	7,72	828774	7,51	235258750	21208758	66540000
SULAWESI TENGGARA	2005	21,45	830410	7,31	254162000	29772454	101690000
SULAWESI TENGGARA	2006	10,57	833745	7,68	426354000	51382202	321560000
SULAWESI TENGGARA	2007	7,53	908881	7,96	461841000	54800000	501529000
SULAWESI TENGGARA	2008	15,28	914102	7,27	566435382	60909858	29866000
SULAWESI TENGGARA	2009	4,60	941953	7,57	589844134	58900688	56318000
SULAWESI TENGGARA	2010	3,87	990975	8,22	595762419	71842992	24032400
SULAWESI TENGGARA	2011	5,09	989727	10,63	700836557	82744077	33804600
SULAWESI TENGGARA	2012	5,25	1034228	11,65	870257871	115207475	34659800
SULAWESI TENGGARA	2013	5,92	1022612	7,50	981035741	126593343	53266770
SULAWESI TENGGARA	2014	9,39	1074717	6,26	1053636011	99811375	58750010
SULAWESI TENGGARA	2015	2,8	1100332	6,88	1176423577	121027373	86399950
SULAWESI TENGGARA	2016	2,39	1192885	6,51	1200634199	97654365	738810238
SULAWESI TENGGARA	2017	2,98	1191429	6,76	1563334271	71365186	1040897146
SULAWESI TENGGARA	2018	2,74	1278427	6,40	1575959517	124542954	1164611106
SULAWESI TENGGARA	2019	2,31	1286394	6,50	1614486358	160272723	1209370996
GORONTALO	2002	14,50	285966	6,45	129040000	3204500	4506783
GORONTALO	2003	5,16	321766	6,88	180108847	6461113	4800000
GORONTALO	2004	8,64	323625	6,93	210715000	7594356	43850000
GORONTALO	2005	18,56	338045	7,19	211012992	13073667	56500000
GORONTALO	2006	7,54	351906	7,30	391390000	14869368	135160000
GORONTALO	2007	7,02	369530	7,51	291394000	17506309	220918000

GORONTALO	2008	9,20	399347	7,76	368637996	19106216	25374000
GORONTALO	2009	4,35	430211	7,54	388325256	18889052	51346000
GORONTALO	2010	7,43	446641	7,63	400750820	26933696	10734900
GORONTALO	2011	4,08	444296	7,71	461118102	26193875	28057200
GORONTALO	2012	5,31	456580	7,91	582140302	30858457	24008330
GORONTALO	2013	5,84	464714	7,67	652284261	26800697	43013530
GORONTALO	2014	6,14	493538	7,27	734279438	24932309	42374060
GORONTALO	2015	4,3	505687	6,22	845395651	20766783	67883960
GORONTALO	2016	1,3	544109	6,52	884557753	27939249	319995163
GORONTALO	2017	4,34	546428	6,73	997598871	26007713	393157693
GORONTALO	2018	2,15	592179	6,49	1006924707	21620422	369637026
GORONTALO	2019	2,84	596153	6,40	1043126752	32600171	436242139
SULAWESI BARAT	2002	0,00	0	0,00	0	0	0
SULAWESI BARAT	2003	0,00	0	0,00	0	0	0
SULAWESI BARAT	2004	0,00	0	0,00	0	0	0
SULAWESI BARAT	2005	0,00	0	0,00	0	0	0
SULAWESI BARAT	2006	7,03	405796	6,90	255207000	18675465	10000000
SULAWESI BARAT	2007	8,16	442318	7,43	279253000	25542787	705098000
SULAWESI BARAT	2008	11,66	461998	12,07	366674672	20552267	45738000
SULAWESI BARAT	2009	1,78	489257	6,03	391060506	25259223	66053000
SULAWESI BARAT	2010	5,12	519314	11,89	405749577	33058411	17532000
SULAWESI BARAT	2011	4,91	559710	10,73	441578798	35302600	35860700
SULAWESI BARAT	2012	3,28	571871	9,25	590680361	43679977	36786280
SULAWESI BARAT	2013	5,91	564862	6,93	685497592	39591546	47017000

SULAWESI BARAT	2014	7,88	593457	8,86	776214122	22534911	50585710
SULAWESI BARAT	2015	5,07	615958	7,31	895580933	23535723	72513950
SULAWESI BARAT	2016	2,23	624145	6,01	925147622	28853076	455010837
SULAWESI BARAT	2017	3,79	608823	6,39	1008360523	25566425	498440658
SULAWESI BARAT	2018	1,8	654134	6,26	1025033063	18969755	453507325
SULAWESI BARAT	2019	1,43	670633	5,67	1064068728	19554644	610909814
MALUKU	2002	9,47	445097	2,87	191710000	16011364	17195722
MALUKU	2003	2,51	440662	4,31	248370000	22387487	13449928
MALUKU	2004	6,04	446310	4,43	272417750	25462906	9704133
MALUKU	2005	17,62	413598	5,07	279055000	42470302	86470000
MALUKU	2006	6,17	433229	5,55	425137000	52749900	250850000
MALUKU	2007	6,44	470323	5,62	476048000	59128984	408908000
MALUKU	2008	10,07	496336	4,23	556236402	59245534	32950800
MALUKU	2009	4,20	530762	5,44	578163797	57775922	68267000
MALUKU	2010	7,11	577166	6,47	607572176	75107503	32771475
MALUKU	2011	2,85	632527	6,34	703993953	79621225	44657700
MALUKU	2012	6,73	626544	7,16	829491474	91686141	38062680
MALUKU	2013	8,81	635772	5,24	897657192	75747289	53424880
MALUKU	2014	9,15	640863	6,64	1019704312	91146640	70134160
MALUKU	2015	7,25	659162	5,48	1177774674	58460626	216914600
MALUKU	2016	3,13	686480	5,73	1260897986	58578255	730397413
MALUKU	2017	4,68	675712	5,82	1555603048	81196827	733329638
MALUKU	2018	2,58	751838	5,91	1670234402	79176363	850028631
MALUKU	2019	2,27	756929	5,41	1699714805	83210773	843459434



MALUKU UTARA	2002	6,40	271713	2,44	144280000	19960830	7296709
MALUKU UTARA	2003	6,27	348574	3,82	200960000	21188061	4800000
MALUKU UTARA	2004	4,82	351345	4,71	212240000	31652695	3700000
MALUKU UTARA	2005	19,42	353467	5,10	229229895	53012236	88110000
MALUKU UTARA	2006	5,12	380231	5,48	338604684	61373764	283660000
MALUKU UTARA	2007	10,43	371685	6,01	370724000	91574936	25000000
MALUKU UTARA	2008	11,25	391335	5,99	451481459	83244058	36482000
MALUKU UTARA	2009	3,88	402686	6,07	458511660	70309380	83658000
MALUKU UTARA	2010	5,32	404038	7,95	479480664	99097999	26386100
MALUKU UTARA	2011	4,52	441372	6,80	540389811	99383716	51233800
MALUKU UTARA	2012	3,29	449909	6,98	703159025	117277966	37858020
MALUKU UTARA	2013	9,78	459013	6,36	772591162	98387627	69688380
MALUKU UTARA	2014	9,34	460752	5,49	906623550	138055203	74623090
MALUKU UTARA	2015	4,52	486348	6,10	1061177950	95965198	146686448
MALUKU UTARA	2016	1,91	507995	5,77	1132578857	86764142	233861505
MALUKU UTARA	2017	1,97	509493	7,67	1265846334	61350046	553215205
MALUKU UTARA	2018	4,12	571497	7,86	1331236347	115223676	654320605
MALUKU UTARA	2019	2,02	549625	6,10	1354662180	118682570	780339362
PAPUA BARAT	2002	0,00	0	0,00	0	0	0
PAPUA BARAT	2003	0,00	0	0,00	0	0	0
PAPUA BARAT	2004	0,00	0	0,00	0	0	0
PAPUA BARAT	2005	0,00	0	0,00	0	0	0
PAPUA BARAT	2006	8,52	273790	4,55	350541000	166505422	10000000
PAPUA BARAT	2007	9,35	271143	6,95	464871000	189697461	986587000

PAPUA BARAT	2008	20,04	314199	7,84	578084261	228288879	50403273
PAPUA BARAT	2009	5,07	329278	13,87	595755729	366026925	68580000
PAPUA BARAT	2010	6,41	327871	28,47	605786464	834804974	21756500
PAPUA BARAT	2011	2,27	343194	3,64	700444910	742881621	40538900
PAPUA BARAT	2012	5	354535	3,63	901398453	576125138	38633110
PAPUA BARAT	2013	6,28	360938	7,36	1064872637	1862951513	64931200
PAPUA BARAT	2014	6,27	385535	5,38	1122264659	1210188346	61215730
PAPUA BARAT	2015	4,47	384630	4,15	1284079495	1119808320	92376080
PAPUA BARAT	2016	4,35	407026	4,52	1322765639	1409724880	489419916
PAPUA BARAT	2017	1,56	405522	4,02	1411972998	1563004880	338947588
PAPUA BARAT	2018	5,49	425388	6,25	1431332966	965764308	444560372
PAPUA BARAT	2019	2,86	434238	2,66	1456520204	2090395883	491563794
PAPUA	2002	13,91	1070472	5,15	345530000	216697367	106286371
PAPUA	2003	8,39	1088620	-0,28	395160000	228192000	27823519
PAPUA	2004	9,45	1143646	-22,53	369929580	202343520	3050960
PAPUA	2005	14,15	1218071	36,40	418866940	265466640	218240000
PAPUA	2006	9,52	910301	-17,14	810237000	381951830	665735000
PAPUA	2007	10,35	942015	4,34	876294996	417686647	750000000
PAPUA	2008	12,55	1015258	-1,40	1002431825	400358658	34203000
PAPUA	2009	1,92	1063478	22,22	1058227764	423554137	81273000
PAPUA	2010	4,48	1287662	-3,19	1148497966	538981324	75055000
PAPUA	2011	3,4	1476354	-4,28	1276285908	545083289	72115650
PAPUA	2012	4,52	1500723	1,72	1569782444	442476496	106191170
PAPUA	2013	8,27	1571188	8,55	1889267850	487855596	133897240

PAPUA	2014	10,15	1623828	3,65	1991202341	493139550	120505640
PAPUA	2015	4,28	1659269	7,35	2277932698	517999392	460303520
PAPUA	2016	2,48	1677959	9,14	2502449137	764470514	328169423
PAPUA	2017	1,83	1691730	4,64	2338200799	413012330	1029337888
PAPUA	2018	6,06	1810257	7,32	2571298119	924041168	918901192
PAPUA	2019	0,63	1780189	-15,75	2616545381	648886536	1198617032

### Lampiran 2: Hasil Regresi *Common Effect*

Dependent Variable: LAJU  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/22/21 Time: 20:15  
 Sample: 2002 2019  
 Periods included: 18  
 Cross-sections included: 32  
 Total panel (balanced) observations: 576

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.080257	0.429516	11.82785	0.0000
INFLASI	0.015570	0.040051	0.388742	0.6976
TK	1.17E-08	3.67E-08	0.319702	0.7493
DAU	5.33E-10	3.33E-10	1.601377	0.1098
DBH	-3.68E-10	1.23E-10	-2.982888	0.0030
DAK	-2.01E-10	1.83E-10	-1.095613	0.2737
R-squared	0.021714	Mean dependent var	5.367344	
Adjusted R-squared	0.013133	S.D. dependent var	3.696042	
S.E. of regression	3.671692	Akaike info criterion	5.449545	
Sum squared resid	7684.356	Schwarz criterion	5.494921	
Log likelihood	-1563.469	Hannan-Quinn criter.	5.467241	
F-statistic	2.530363	Durbin-Watson stat	1.906298	
Prob(F-statistic)	0.028023			

### Lampiran 3: Hasil Regresi *Fixed Effect Models*

Dependent Variable: LAJU  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/22/21 Time: 20:11  
 Sample: 2002 2019  
 Periods included: 18  
 Cross-sections included: 32  
 Total panel (balanced) observations: 576

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.216946	1.159123	2.775327	0.0057
INFLASI	0.042239	0.039474	1.070037	0.2851
TK	4.69E-07	3.71E-07	1.262117	0.2075
DAU	6.52E-10	3.74E-10	1.741390	0.0822
DBH	7.10E-12	1.50E-10	0.047231	0.9623
DAK	-4.03E-10	1.96E-10	-2.050729	0.0408
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				

R-squared	0.163213	Mean dependent var	5.367344
Adjusted R-squared	0.107324	S.D. dependent var	3.696042
S.E. of regression	3.492077	Akaike info criterion	5.400951
Sum squared resid	6572.892	Schwarz criterion	5.680770
Log likelihood	-1518.474	Hannan-Quinn criter.	5.510077
F-statistic	2.920296	Durbin-Watson stat	2.202546
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### Lampiran 4: Hasil Regresi *Random Effect Models*

Dependent Variable: LAJU

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/22/21 Time: 20:16

Sample: 2002 2019

Periods included: 18

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 576

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.805505	0.463828	10.36054	0.0000
INFLASI	0.028491	0.038751	0.735211	0.4625
TK	7.84E-09	4.96E-08	0.158060	0.8745
DAU	7.02E-10	3.35E-10	2.096675	0.0365
DBH	-1.92E-10	1.32E-10	-1.456852	0.1457
DAK	-2.60E-10	1.77E-10	-1.463673	0.1438

#### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.924836	0.0655
Idiosyncratic random	3.492077	0.9345

#### Weighted Statistics

R-squared	0.011847	Mean dependent var	3.568324
Adjusted R-squared	0.003179	S.D. dependent var	3.535917
S.E. of regression	3.530293	Sum squared resid	7103.891
F-statistic	1.366722	Durbin-Watson stat	2.047383
Prob(F-statistic)	0.235095		

#### Unweighted Statistics

R-squared	0.017904	Mean dependent var	5.367344
Sum squared resid	7714.287	Durbin-Watson stat	1.885383

### Lampiran 5: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.940125	(31,539)	0.0000
Cross-section Chi-square	89.989977	31	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LAJU

Method: Panel Least Squares

Date: 12/22/21 Time: 20:18

Sample: 2002 2019

Periods included: 18

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 576

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.080257	0.429516	11.82785	0.0000
INFLASI	0.015570	0.040051	0.388742	0.6976
TK	1.17E-08	3.67E-08	0.319702	0.7493
DAU	5.33E-10	3.33E-10	1.601377	0.1098
DBH	-3.68E-10	1.23E-10	-2.982888	0.0030
DAK	-2.01E-10	1.83E-10	-1.095613	0.2737

R-squared	0.021714	Mean dependent var	5.367344
Adjusted R-squared	0.013133	S.D. dependent var	3.696042
S.E. of regression	3.671692	Akaike info criterion	5.449545
Sum squared resid	7684.356	Schwarz criterion	5.494921
Log likelihood	-1563.469	Hannan-Quinn criter.	5.467241
F-statistic	2.530363	Durbin-Watson stat	1.906298
Prob(F-statistic)	0.028023		

### Lampiran 6: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	10.699299	5	0.0577

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INFLASI	0.046851	0.042250	0.003921	0.9414
TK	0.000000	0.000000	0.000000	0.0162
DAU	0.000000	0.000000	0.000000	0.6094
DBH	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0026
DAK	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.0180

Period random effects test equation:

Dependent Variable: LAJU

Method: Panel Least Squares

Date: 12/22/21 Time: 20:19

Sample: 2002 2019

Periods included: 18

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 576

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.780898	1.438925	3.322547	0.0010
INFLASI	0.046851	0.074249	0.630996	0.5283
TK	1.65E-09	4.16E-07	0.003963	0.9968
DAU	4.32E-10	5.68E-10	0.759673	0.4478
DBH	-1.05E-10	1.54E-10	-0.683446	0.4946
DAK	-3.69E-11	2.47E-10	-0.148985	0.8816

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.199640	Mean dependent var	5.367344
Adjusted R-squared	0.118377	S.D. dependent var	3.696042
S.E. of regression	3.470390	Akaike info criterion	5.415471
Sum squared resid	6286.762	Schwarz criterion	5.823856
Log likelihood	-1505.656	Hannan-Quinn criter.	5.574736
F-statistic	2.456728	Durbin-Watson stat	2.254761
Prob(F-statistic)	0.000000		